

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Harian Umum Kompas

3.1.1 Sejarah Harian Umum Kompas

Awalnya Petrus Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama (JO), bersama J. Adisubrata dan Irawati SH. melahirkan majalah pertama yang diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 1963, langkah ini merupakan langkah awal lahirnya dari Kompas. Ide awal penerbitan harian ini datang dari Jenderal Ahmad Yani, yang mengutarakan keinginannya kepada Frans Xaverius Seda (Menteri Perkebunan dalam kabinet Soekarno) untuk menerbitkan surat kabar yang berimbang, kredibel, dan independen. Frans kemudian mengemukakan keinginan itu kepada dua teman baiknya, Petrus Kanisius Ojong (Tionghoa : Auwjong Peng Koen) (1920-1980), seorang pimpinan redaksi mingguan Star Weekly, dan Jakob Oetama, wartawan mingguan Penabur milik gereja Katolik, yang pada waktu itu sudah mengelola majalah Intisari ketika PT Kinta akan mengalami kebangkrutan yang terbit tahun 1963. Ojong langsung menyetujui ide itu dan menjadikan Jakob Oetama sebagai *editor in-chief* pertamanya.

Pada 1964, Presiden Soekarno mendesak Partai Katholik untuk mendirikan media cetak berbentuk surat kabar, maka dari wartawan bulanan Intisari inilah sebagian wartawan Katolik direkrut. Selanjutnya, beberapa tokoh Katolik tersebut mengadakan pertemuan bersama beberapa wakil elemen hierarkis dari Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI): Partai Katolik, Perhimpunan

Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Pemuda Katolik dan Wanita Katolik. Mereka sepakat mendirikan "Yayasan Bentara Rakyat".

Susunan pengurus pertama dari Yayasan Bentara Rakyat adalah Ignatius Joseph Kasimo (ketua Partai Katolik) sebagai ketua, Frans Seda sebagai wakil ketua, Franciscus Conradus Palaoensoeka sebagai penulis pertama, Jakob Oetama sebagai penulis kedua, dan P.K. Ojong sebagai bendahara. Dari yayasan tersebut, harian ini mulai diterbitkan.

Pada awal penerbitannya, Frans Seda disarankan oleh Jenderal Ahmad Yani agar Kompas memberikan wacana untuk menandingi wacana Partai Komunis Indonesia yang berkembang pada saat itu. Namun secara pribadi, Jakob Oetama dan beberapa pemuka agama Katolik seperti Monsignor Albertus Soegijapranata dan I.J. Kasimo tidak mau menerima begitu saja, karena mengingat kontekstual politik, ekonomi dan infrastruktur pada saat itu tidak mendukung.

Izin sudah dimiliki, tetapi "Bentara Rakyat" tidak kunjung terbit. Rupanya rintangan belum semuanya berlalu. Masih ada satu halangan yang harus dilewati, yakni izin dari Panglima Militer Jakarta yang pada saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel Dachja. Dari markas militer Jakarta, diperoleh jawaban izin operasi keluar apabila syarat 5.000 tanda tangan pelanggan terpenuhi. Akhirnya, para wartawan pergi ke pulau Flores untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, karena memang mayoritas penduduk Flores beragama Katolik.

Nama "Bentara" sesuai dengan selera orang Flores. Majalah Bentara, katanya, juga sangat populer di sana. Ketika akan menjelang terbit pertama kalinya, Frans Seda melaporkan pada presiden Soekarno tentang persiapan terbitan perdana harian tersebut. Namun, dari Presiden Soekarno inilah lahir nama "Kompas" yang berarti adalah penunjuk arah. Akhirnya berdasarkan kesepakatan redaksi pada saat itu, untuk menerima usulan dari Presiden Soekarno untuk mengubah nama harian Bentara Rakyat menjadi Kompas. Atas usul Presiden Soekarno, namanya diubah menjadi Kompas. Menurut Bung Karno, "Kompas" berarti pemberi arah dan jalan dalam mengarungi lautan dan hutan rimba.

Setelah mengumpulkan tanda bukti 3000 calon pelanggan sebagai syarat izin penerbitan, akhirnya Kompas terbit pertama kali pada tanggal 28 Juni 1965. Pada mulanya kantor redaksi Kompas masih menumpang di rumah Jakob Oetama, kemudian berpindah menumpang di kantor redaksi Majalah Intisari. Pada terbitan perdananya, Kompas hanya terbit 4 halaman dengan iklan yang hanya berjumlah 6. Selanjutnya, pada masa-masa awal berdirinya (1965) Koran Kompas terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, lalu terbit 4 kali seminggu, dan hanya dalam kurun waktu 2 tahun telah berkembang menjadi surat kabar harian nasional dengan oplah mencapai 30.650 eksemplar.

Motto "Amanat Hati Nurani Rakyat" yang diletakkan di bawah logo Kompas menggambarkan visi dan misi Kompas dalam menyuarakan hati nurani rakyat. Adapun tujuan Kompas, yaitu pertama, ingin berkembang sebagai institusi pers yang mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengkotaan, latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Kedua, ingin berkembang sebagai "Indonesia

mini” karena Kompas sendiri adalah lembaga yang terbuka, kolektif, ingin ikut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa. Ketiga, ingin menempatkan kemanusiaan sebagai nilai tertinggi, mengarahkan fokus perhatian dan tujuan pada nilai-nilai yang transeden atau mengatasi kepentingan kelompok.

Halaman pertama pojok kiri atas, tertulis nama staf: Pemimpin Redaksi Jakob Oetama; Staf Redaksi J. Adisubrata, Lie Hwat Nio, Marcel Beding, Th. Susilastuti, Tan Soei Sing, J. Lambangdjaja, Tan Tik Hong, Th. Ponis Purba, Tinon Prabawa, dan Eduard Liem. Menurut Jakob Oetama, nama P. K. Ojong ketika itu tabu politik. Lagipula, figur Ojong tidak disukai Soekarno.

Seiring dengan pertumbuhannya, seperti kebanyakan surat kabar yang lain, harian Kompas saat ini dibagi menjadi tiga bagian (*section*), yaitu bagian depan yang memuat berita nasional dan internasional, bagian berita bisnis dan keuangan, bagian berita olahraga dan iklan baris yang disebut dengan "Klasika". Harian Kompas diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara.

Ideologi Kompas selalu digunakan dalam produk jurnalistik Kompas. Petrus Kanisius Ojong dan Jakob Oetama selalu mengajarkan jurnalisme yang santun kepada para karyawan Kompas dengan jalan mengedepankan cara yang santun dan elegan dalam memberikan kritik terhadap suatu keadaan.

Gaya surat kabar Kompas menerapkan gaya jurnalisme keping yang bersikap hati-hati terutama dalam mengulas konflik. Harian Kompas juga menerapkan prinsip humanisme transedental agar bisa diterima semua pihak dan kalangan. Selain itu, keberadaan tim Penyelaras Bahasa (BP) yang melakukan penyeragaman bahasa.

Namun dengan terus berkembangnya teknologi informasi masyarakat Indonesia, maka harian umum Kompas mengkloningkan dirinya yaitu menjadi *Kompas.com* adalah salah satu pionir media *online* di Indonesia ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Mulanya, *Kompas Online* atau KOL yang diakses dengan alamat *kompas.co.id* hanya menampilkan replika dari berita-berita harian *Kompas* yang terbit hari itu.

Tujuannya adalah memberikan layanan kepada para pembaca harian *Kompas* di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jaringan distribusi Kompas. Hadirnya *Kompas Online*, para pembaca harian *Kompas* terutama di Indonesia bagian timur dan di luar negeri dapat menikmati harian *kompas* hari itu juga, tidak perlu menunggu beberapa hari seperti biasanya. Selanjutnya, demi memberikan layanan yang maksimal, di awal tahun 1996 alamat *Kompas Online* berubah menjadi *www.kompas.com*. Dengan alamat baru, *Kompas Online* menjadi semakin populer buat para pembaca setia harian *Kompas* di luar negeri.

Melihat potensi dunia digital yang besar, *Kompas Online* kemudian dikembangkan menjadi sebuah unit bisnis tersendiri di bawah bendera PT Kompas Cyber Media (KCM) pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, *Kompas Online* lebih dikenal dengan sebutan KCM. Di era ini, para pengunjung KCM tidak lagi hanya mendapatkan replika harian *Kompas*, tapi juga mendapatkan *update* perkembangan berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari. Pengunjung KCM meningkat pesat seiring dengan tumbuhnya pengguna Internet di Indonesia. Mengakses informasi dari Internet kini telah menjadi bagian

tak terpisahkan dari hidup kita sehari-hari. Dunia digital pun terus berubah dari waktu ke waktu. KCM pun berbenah diri.

Pada 29 Mei 2008, portal berita ini *me-rebranding* dirinya menjadi *Kompas.com*, merujuk kembali pada brand Kompas yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding Kompas.com* ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

3.1.2 Visi, Misi dan Nilai-nilai Dasar Kompas

A. Visi Kompas

Visi Kompas adalah “Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan”. Dalam kiprahnya pada industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia baru berdasarkan Pancasila melalui prinsip humanisme transedental (persatuan dalam perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur.

Dalam kiprahnya di industri pers “Visi Kompas” berpartisipasi membangun masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila melalui prinsip humanism transcendental (persatuan dan perbedaan) dengan menghormati individu dan masyarakat adil dan makmur, seperti uraian sebagai berikut:

Pertama, Kompas adalah lembaga pers yang bersifat umum dan terbuka. *Kedua*, Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi. *Ketiga*, Kompas secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok. *Keempat*, Kompas adalah koran nasional yang berusaha mewujudkan aspirasi dan cita-cita bangsa. *Kelima*, Kompas bersifat luas dan bebas dalam pandangan yang dikembangkan tetapi selalu memperhatikan konteks struktur kemasyarakatan dan pemerintahan yang menjadi lingkungan (Kasman, 2010: 160)

B. Misi Kompas

Misi Kompas adalah “Mengantisipasi dan merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (trend setter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi terpercaya”. Kompas berperan serta ikut mencerdaskan bangsa, menjadi nomor satu dalam semua usaha di antara usaha-usaha lain yang sejenis dalam kelas yang sama. Hal tersebut dicapai melalui etika usaha bersih dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Hal ini dapat dijabarkan dalam 5 sasaran operasional:

1. Kompas memberikan informasi yang berkualitas dengan ciri: tepat, cermat, utuh dan selalu mengandung makna.
2. Kompas memiliki bobot jurnalistik yang tinggi dan terus dikembangkan untuk mewujudkan aspirasi dan selera terhormat yang dicerminkan dalam gaya kompak, komunikatif dan kaya nuansa kehidupan dan kemanusiaan.

3. Kualitas informasi dan bobot jurnalistik dicapai melalui upaya intelektual yang penuh empati dengan pendekatan rasional, memahami jalan pikiran dan argumentasi pihak lain, selalu berusaha mendudukan persoalan dengan penuh pertimbangan tetapi tetap kritis dan teguh pada prinsip.
4. Berusaha menyebarkan informasi seluas-luasnya dengan meningkatkan oplah.
5. Untuk dapat merealisasikan visi dan misi Kompas harus memperoleh keuntungan dari usaha. Namun keuntungan yang dicari bukan sekedar demi keuntungan itu sendiri tetapi menjunjung kehidupan layak bagi karyawan dan pengembangan usaha sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan.

C. Nilai-nilai Dasar Kompas

Nilai-nilai dasar Kompas merupakan seluruh kegiatan dan keputusan harus berdasarkan dan mengikuti nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dengan harkat dan martabat
- b. Mengutamakan watak baik
- c. Profesionalisme
- d. Semangat kerja tim
- e. Berorientasi kepada kepuasan konsumen
- f. Tanggung jawab sosial
- g. Bertingkah laku mengikuti nilai-nilai



Gambar 3.1 Logo media online Kompas.com

3.1.3 Struktur Organisasi Harian Kompas

Dalam hal organisasi Kompas merupakan surat kabar harian yang mempunyai struktur managerial dalam organisasi berpengalaman. Berikut merupakan struktur organisasi pada surat kabar Kompas:

- **Pemimpin Umum** : Jakob Oetama
- **Wakil Pemimpin Utama** : Lilik O etama, Rikard Begun
- **Pemimpin Redaksi** : Budiman Tanuredjo
- **Wakil Pemimpin Redaksi** : Trias Kuncahyono, ninuk Mardiana
Pambudi, James Luhulima
- **Redaktur Senior** : St. Sularto
- **Redaktur Pelaksana** : Mohammad Bakir
- **Wakil Redaktur Pelaksana** : Rusdi Amral, Try Harijono, P. Tri Agung
Kristanto, Sutta Dharmaputra
- **Sekretaris Redaksi** : Subur Tjahjono, Mohammad Nasir
- **Staf Redaksi** : Taufik Mihardja, S J. Osdar, Cris Pudjiastuti, Pieter P.
Gero, M. Suprihadi, Myrna Ratna M, Johnny T. Gunardi, Sri Hartati
Samhadi, Banu Astono, Try Harijono, P Tri Agung Kristanto, Yunas
Santhani Aziz, Sutta Dharmasaputra, Johannes Waskita Utama, Bre
Redana, Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Mohamad

Subhan, Yesayas Oktavianus, Agnes Aristiarini, Agus Hermawan, Fandri Yuniarti, Frans Sartono, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo, R. Adhi Kusumaputra, Suhartono, Agus Mulyadi, Tjahja Gunawan Diredja, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahjono, Yovita Arika, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Johannes Eudes Wawa, Nasru Alam Aziz,

Lokasi kantor redaksi Kompas terletak di Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270, dengan nomor telepon 534 7710/20/30, 530 2200 dan fax 548 6085/548 3581. Selain alamat kantor redaksi, Kompas juga memiliki alamat surat (Seluruh Bagian): PO BOX 4612 Jakarta 12046, dan alamat kawat Kompas Jakarta. Dengan nama penerbit PT Kompas Media Nusantara. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No.013/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 19 November 1985, serta keputusan Laksus pangkopkamtibda No. 103/ PC/1969 tanggal 21 Januari 1969. Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: No 37/1965/11/A/2002 Percetakan PT. Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN (Kompas, 17/1/2014: 15)

3.2 Profil Harian Umum Republika

3.2.1 Sejarah Harian Umum Republika

Republika adalah sebuah koran nasional yang lahir dari kalangan komunitas muslim bagi publik di Indonesia. Republika berdiri sejak 1992 dan pertama kali menerbitkan koran pada 1993 oleh Yayasan Abdi Bangsa dan didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kini harian Republika diterbitkan oleh PT. Republika Media Mandiri dan menjadi harian umum. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya

kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.

PT Abdi Bangsa kemudian menjadi perusahaan induk, dan Republika berada di bawah bendera PT. Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT. Abdi Bangsa. Di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan Majalah *Golf Digest* Indonesia, Majalah Parents Indonesia, stasiun radio Jak FM, Gen FM, Delta FM, Female Radio, Prambors, Jak tv, dan Alif TV. Meski berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat.

Meski berganti kepemilikan, Republika tidak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Penerbitan Republika menjadi berkah bagi masyarakat. Sebelum masa itu, aspirasi umat tidak mendapat tempat dalam wacana nasional. Kehadiran media ini bukan hanya memberi saluran bagi aspirasi tersebut, namun juga menumbuhkan pluralisme informasi di masyarakat. Karena itu kalangan umat antusias memberidukung, antara lain dengan membeli saham sebanyak satu lembar saham perorang. PT. Abdi Bangsa Tbk sebagai penerbit Republika pun menjadi perusahaan yang menjadi perusahaan publik. (<http://www.republika.co.id/halaman/23>).

Kelahiran Republika tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Republika lahir sebagai perwujudan salah satu program ICMI. Organisasi ICMI bukan sekedar perkumpulan

cendekiawan muslim tetapi juga sebagai perhimpunan kekuatan politik Islam yang pada masa 70 dan 80-an banyak dipinggirkan oleh rezim Golkar dan militer.

Sejak berdiri, motto “Bukan Sekedar Menjual Berita” digunakan oleh Republika. Ideologi Republika adalah ideologi pemilikinya, PT Abdi Bangsa, yaitu Kebangsaan, Kerakyatan dan Keislaman. Republika banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti keterbukaan, pluralisme, kecanggihan dunia informasi (Hamad, 2004, 120).

Tahun 1995, Republika membuka situs web di internet. Republika menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ) pada tahun 1997. Pendekatan juga dilakukan kepada komunitas pembaca lokal. Republika menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah. Selalu dekat dengan publik pembaca adalah komitmen Republika untuk maju. Republika tercatat sebagai perusahaan penerbitan pers (koran) pertama yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (Listed) tahun 2001.

Mulai tahun 2004, Republika dikelola oleh PT Republika Media Mandiri (RMM). Sementara PT Abdi Bangsa naik menjadi perusahaan induk (Holding Company). Di bawah PT RMM, Republika terus melakukan inovasi penyajian. Segala kreativitas dicurahkan untuk sedapat mungkin membuat Republika dan meladeni keinginan publik. Saat ini RMM berada di bawah bendera Mahaka Media, kelompok ini juga menerbitkan majalah Golf Digest, koran berbahasa mandarin Harian Indonesia, majalah Parents, majalah a+, radio Jak FM, dan JakTV. Mahaka Media juga melakukan kolaborasi dengan kelompok radio

Prambors, terutama radio Female dan Delta. Perbedaan gaya bahasa sebelumnya menambah ruang bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu secara bisnis koran ini terus berkembang menjadi profesional dan matang sebagai koran nasional untuk komunitas muslim.

Beberapa terobosan-terobosan yang dilakukan oleh koran Republika dari segi isi yaitu kerjasama Republika dengan The New York Times (AS) dan Berita Harian (Malaysia). Kolaborasi Republika dengan dua koran asing itu menunjukkan inovasi koran ini terhadap gagasan-gagasan di luar arus sebagai surat kabar komunitas muslim. Selain itu dari sisi Lay Out Republika juga terus melakukan perubahan-perubahan, yang hasilnya pada tahun 2009 memperoleh The Best Newspaper Front Pages Design Asia Media Award dari Asosiasi Surat Kabar Dunia pada WAN-IFRA ke 8.

Di samping itu, Republika juga mempunyai portal berita yang diberi nama Republika Online (ROL). ROL hadir sejak 17 Agustus 1995. ROL adalah portal berita yang menyajikan informasi melalui teks, audio dan video berdasar teknologi hipermedia dan hiperteks. Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. Kini ROL hadir dalam dua bahasa yakni versi bahasa Inggris dan Indonesia. (<http://profil.merdeka.com/indonesia/r/republika/>).

ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang

terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. (<http://www.republika.co.id/page/about>)

3.2.2 Visi, Misi, dan Nilai-nilai Dasar Republika

A. Visi Republika

Menjadikan harian umum Republika sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuk, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan Lil Alamin* yaitu Rahmat bagi semua makhluk didunia.

B. Misi Republika

Republika menampilkan Islam sebagai satu kesatuan. Bingkai Republika yang menonjolkan aspek agama karena harian ini mengusung ideologi keislaman. Berikut ini Misi republika :

1. Menciptakan dan menghidupkan sistem manajemen yang efisien dan efektif, serta mampu dipertanggungjawabkan secara profesional.
2. Menciptakan budaya kerja yang sehat dan transparan.
3. Meningkatkan kinerja dengan menciptakan sistem manajemen yang kondusif dan profesional.
4. Meningkatkan penjualan iklan dan koran, sementara menekan biaya operasional (antara lain dengan memiliki mesin cetak).
5. Memprioritaskan pengembangan pemasaran surat kabar Republika di Jabodetabek, tanpa harus mematikan di daerah yang sudah ada.

6. Merajut tali persaudaraan dengan organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Republika menampilkan Islam sebagai satu kesatuan. Bingkai Republika yang menonjolkan aspek agama karena harian ini mengusung ideologi keislaman. Harian Republika memilih bermain "aman" dengan menghindari sesuatu yang kontra produktif. Karena ideologinya berencana merangkul semua kelompok Islam, Republika tidak membeda-bedakan Islam radikal-konservatif, moderat dan liberal.

C. Nilai-nilai Dasar Republika

Republika menampilkan Islam sebagai satu kesatuan. Bingkai Republika yang menonjolkan aspek agama karena harian ini mengusung ideologi keislaman. Harian Republika memilih bermain "aman" dengan menghindari sesuatu yang kontraproduktif. Karena ideologinya berencana merangkul semua kelompok Islam, Republika tidak membeda-bedakan Islam radikal-konservatif, moderat dan liberal.



Gambar 3.2 Media online republika.co.id

3.2.3 Struktur Organisasi Harian Umum Republika

PT Republika Media Mandiri

- a. **CEO Republika** : Mira R Djarot
- b. **Direktur Operasional** : Arys Hilman Nugraha
- c. **GM Marketing dan Sales** : Yulianingsih Yamin
- d. **Pemimpin Redaksi** : Irfan Junaidi
- e. **Wakil Pemimpin Redaksi** : Nur Hasan Murtiaji
- f. **Redaktur Pelaksana ROL** : Maman Sudiaman
- g. **Wakil Redaktur Pelaksana ROL** : Joko Sadewo
- h. **Asisten Redaktur Pelaksana ROL** : Didi Purwadi, Muhammad Subarkah
- i. **Tim Redaksi** : Agung Sasongko, Bayu Hermawan, Bilal Ramadhan, Citra Listya Rini, Damanhuri Zuhri, Esthi Maharani, Hazliansyah, A.Syalaby Ichsan, Ilham Tirta, Indira Rezkisari, Israr Itah, Julkifli Marbun, M.Akbar, Taufik Rahman, Winda Destiana Putri, Yudha anggala Putra, M.Amin Madani, Sadly Rachman, Ririn Liechtiana, Fian Firatmaja, Ani Nursalikhah, Angga Indrawan, Dwi Murdaningsih.Nidia Zuraya, Nur Aini, Teguh Firmansyah, Andi Nur Aminah, Karta Raharja Ucu.
- j. **Tim Sosmed** : Fanny Damayanti, Asti Yulia Sundari, Dian Alfiah, M. Fauzul Abraar, Inarah.
- k. **Sales Coordinator** : Heru Supriyatin
- l. **Tim Sales dan Promosi** : W.K.Hadi Laga, Rani Kurniasari, Rizka Vardya, Ade Afriyani, Achmad Yani, Annisha Ravka Batra, Budhi Irianto

- m. **Tim IT dan Desain** : Mohamad Afif, Mufti Nurhadi, Abdul Gadir,
Nandra Maulana Irawan, Mardiah, Kurnia Fakhrini.
- n. **Kepala Support dan GA** : Slamet Riyanto
- o. **Tim Support** : Firmansyah
- p. **Sekred** : Erna Indriyanti
- q. **Rolshop** : Riky Romadon

Lokasi kantor redaksi Republika terletak di Jl. Warung Buncit Raya No 37 Jakarta Selatan 12510 ext 308. Dengan nomor telepon 021 7803747 ext 308 dan Fax +6221 7997903. Selain via telepon, republika juga bisa dihubungi via Email newsroom@rol.republika.co.id. Untuk nomor telepon Iklan 021 7803747 ext 231, 232, Fax 021 7803747 ext 231, 232. Email: marketing@rol.republika.co.id.
Republika Online (ROL Shop) : Riky Romadon Phone: 021 7803747 Fax: 021-7997903 Email: rolshop@rol.republika.co.id

3.3 Latar Belakang Peristiwa Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama Oleh

Ahok di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id

Isu SARA menjelang Pilkada DKI 2017 dilaksanakan serentak diseluruh indonesia, tidak lepas dari pemberitaan media massa khususnya online tentang sosok sebagai pemimpin politik beretnis Cina, terkait dugaan penistaan agama. Hal tersebut menuai berbagai kontroversi di masyarakat terkait pidato nya yang ia sampaikan di kepulauan seribu, Jakarta.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka, terkait dugaan penistaan agama. Peristiwa dugaan penistaan agama ini bermula saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada Selasa, 27

September 2016. Saat berpidato di hadapan warga, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada 2017. Pernyataan tersebut disertai kutipan surat Al Maidah ayat 51 yang menuai reaksi publik.

Pada Kamis, 6 Oktober 2016, video Ahok yang menyebut surat Al Maidah ayat 51 itu viral di media sosial *facebook* milik Buni Yani. Video ini lantas memicu kemarahan sebagian besar umat Islam. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama.

Setelah menjadi sorotan publik, pada Senin, 10 Oktober 2016, Ahok meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Ahok menyatakan tidak bermaksud menyinggung umat Islam. Nyatanya pernyataan Ahok terkait dugaan penistaan agama masih menuai reaksi, demonstrasi pun pecah di depan balai kota DKI Jakarta pada Jumat, 14 Oktober 2016.

Ahok pun mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 24 Oktober 2016 untuk memberi klarifikasi terkait pernyataannya di Kepulauan Seribu. Namun, kekecewaan publik atas dugaan penistaan agama tersebut nyatanya tak terbendung lagi. Jumat, 4 November 2016, massa dari berbagai daerah memadati sejumlah titik di jantung ibukota termasuk di kawasan ring 1 Istana Negara.

Atas nama kebebasan demokrasi, massa turun ke jalan menuntut proses hukum Ahok atas dugaan penistaan agama segera dituntaskan. Pintu Istana akhirnya terbuka, Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka dialog dengan perwakilan

demonstran. Kata sepakat pun tercapai. Pemerintah menjanjikan proses hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan transparan.

Ahok, terlapor dugaan penistaan agama pun memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri, Senin, 7 November 2016. Proses penyelidikan terkait dugaan penistaan agama tersebut ditangani langsung oleh Kepolisian Republik Indonesia. Beberapa saksi ahli dihadirkan untuk memeriksa apakah dugaan penistaan, benar dilakukan oleh sang terlapor. Proses hukum berjalan sesuai dengan konstruksinya.

Setidaknya sudah 22 saksi yang telah diperiksa, terdiri dari 10 saksi ahli dari tiga bidang yaitu ahli bahasa dari UGM, ahli agama dari MUI dan ahli hukum pidana dari UI dan Universitas Islam Indonesia. 12 saksi lain adalah pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta, warga Kepulauan Seribu dan Staf Ahok.

Bareskrim Polri pun langsung melakukan gelar perkara secara terbuka pada Selasa, 15 November 2016. Meski awalnya terbuka, gelar perkara yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berlangsung tertutup. Gelar perkara ini dihadiri kelompok pelapor dan kelompok terlapor. Dari pelapor hadir sejumlah saksi ahli, termasuk di antaranya pemimpin FPI Rizieq Shihab. Kemudian pada Rabu, 16 November 2016, Ahok resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Namun ada yang berbeda dengan hasil unggahan video yang di unggah oleh Pemprov DKI Jakarta dengan yang di unggah oleh Buni yani. Pada 28 September Pemprov DKI mengunggah rekaman video full kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu dengan durasi 1:48:33. Sejak 27 September 2016, ketika acara berlangsung, hingga 28 September 2016 setelah Pemprov DKI mengunggah

rekaman video kunjungan Ahok dan temu warga di Kepulauan Seribu, tidak ada masalah, hingga 9 hari kemudian.

Hingga 6 Oktober 2016, Buni Yani Mengunggah video rekaman pidato tersebut di akun Facebooknya, berjudul ‘Penistaan terhadap Agama?’ dengan transkripsi pidato dan video Ahok (*yang telah dipotong ’30 detik dan menghapus kata ‘pakai’. Ia menuliskan ‘karena dibohongi Surat Al Maidah 51’ dan bukan “karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51)*

Diketahui bahwa Buni Yani telah mengedit video asli yang di unggah Pemprov Jabar untuk menekankan pemelintiran dengan kalimat yang provokatif. Sehingga beberapa harian umum menurunkan laporan terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, sebagaimana yang diprovokasi oleh Buni Yani melalui akun facebooknya. Hingga salah satu harian umum republika menurunkan laporan “**Video Ahok: ‘Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos’**”. Berita tersebut menjadi viral di media sosial.

3.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Framing Terhadap “Pemberitaan Dugaan Penistaan Agama di Media Online Kompas.com dan Republika.co.id

Untuk melihat *frame* media Online Kompas.com dan Republika.co.id dalam analisis ini akan dibahas per berita edisi Oktober – Desember 2016 dipilih sebanyak masing-masing 5 berita yang berkaitan dengan dugaan penistaan agama oleh Ahok. Menggunakan model Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki dengan empat struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Berikut adalah daftar berita terkait pemberitaan kasus penistaan agama.

3.4.1 Frame Media Online Kompas dalam Pemberitaan “Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok” Edisi Oktober – Desember 2016

Suatu hari setelah pernyataan yang disampaikan Ahok yang menyertakan surah Al-maidah ayat 51 di kepulauan seribu, hingga video menjadi viral di Media sosial yang diunggah Buni Yani di Akun Facebooknya, Kompas menurunkan berita mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok (06 Oktober 2016), dengan judul “Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Berencana Laporkan Ahok ke Polisi”. Dalam pandangan Kompas, dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok sebagai masalah yang kontroversial paling besar sepanjang sejarah memancing kemarahan kaum muslim di Indonesia dari sudut hukum tata negara dan agama karena dianggap telah menghina agama Islam. Kompas terlihat cukup berhati-hati dalam memilih keberpihakannya, Kompas lebih menonjolkan sisi ke netralannya. Selain itu Pandangan semacam ini akan terlihat dari bagaimana Kompas melakukan strategi wacana tertentu dalam berita untuk mendukung gagasannya.

Tabel 3.1 Data Analisis Berita

No	Tanggal	Judul Berita	Jumlah Paragraf
1	06 Oktober 2016	Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Berencana Laporkan Ahok ke Polisi)	7
2	07 Oktober 2016	Ahok Bantah Menghina Kitab Suci	10
3	08 November 2016	Hamka Haq: Tidak Ada Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok	10

4	29 November 2016	Kasus Dugaan Penistaan Agama Jadi Beban Elektoral bagi Ahok-Djarot"	14
5	11 Desember 2016	Kasus Penistaan Agama Disebut untuk Menjegal Ahok dalam Pilkada DKI	15

3.4.2 Penerapan Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Kompas

Lazimnya sebuah isu nasional yang sedang hangat diperbincangkan, maka kasus merebaknya dugaan penistaan agama oleh ahok, yang diwarnai berbagai aksi demonstrasi mendapat perhatian serius dari Kompas. Beberapa judul berikut memberikan gambaran bagaimana konstruksi pemberitaan Kompas tentang dugaan penistaan agama.

1. Berita 06 Oktober 2016 (Judul : Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Berencana Laporkan Ahok ke Polisi)

Kamis, 06 Oktober 2016, Muhammadiyah Pedri Kasman berencana akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait pernyataan Ahok yang dinilai telah menghina isi ayat Al-qur'an beberapa waktu lalu.

Kompas menekankan bahwa pernyataan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sebagai salah satu pihak yang menilai adanya tindak dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Ketika pernyataannya beberapa waktu lalu di Kepulauan Seribu Jakarta secara terang telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Alquran. Oleh karena itu, Kompas menekankan dengan menyertakan langsung dari pihak yang Kontra dengan pernyataan Ahok. Pandangan Kompas ini dapat dilihat dari judul berita serta kutipan berita berikut ini :

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Berencana Laporkan Ahok ke Polisi (06/10/16)

Kompas.com - Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau ke Polda Metro Jaya. Laporan itu, kata Pedri, terkait pernyataan Ahok yang dinilai menghina agama Islam saat kunjungannya ke Pulau Seribu beberapa waktu yang lalu.

"Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyesalkan statement Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terang telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Alquran," ujar Pedri melalui pernyataan tertulis, Kamis (6/10/2016).

Pedri mengatakan, pernyataan Ahok tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan penistaan bagi Islam. Bahkan, kata Pedri, Ahok telah melecehkan dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan.

"Kami akan laporkan Ahok ke Polda Metro Jaya secara resmi dengan tuduhan penistaan agama," ujar Pedri. (06/10/16)

Kompas memaknai pernyataan Pedri Kasman sebagai pernyataan yang dinilai kontra dengan pernyataan Ahok saat di Kepulauan seribu beberapa waktu lalu. Sama halnya dalam pandangan Kompas, hal ini bisa memicu Isu SARA menjelang Pilkada DKI 2017. Kompas menangkap pernyataan tersebut tanpa mempunyai sikap yang jelas atas pernyataan tersebut. Dengan strategi wacana seperti itu, makna yang muncul dari berita yang ditulis Kompas adalah pendapat yang meruncing dari pihak yang tidak setuju atas pernyataan Ahok. Kompas menempatkan masing-masing pihak tidak ditempatkan lebih besar atau lebih kecil, tetapi ditampilkan dalam porsi yang sama.

Dari struktur *sintaksis*, akan terlihat bagaimana frame tersebut disusun dalam skema berita yang dibuat. Frame tersebut tampak jelas dari judul berita yang dipakai "Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Dengan pemakaian judul semacam itu, terlihat hanya satu sosok yang menjadi sandaran informasi,

yakni Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Tidak ada narasumber lain yang dijadikan sandaaran informasi, membuat berita ini kurang padat informasi. Kemudian dengan pemakaian judul semacam itu, Kompas ingin menekankan bahwa letak perdebatan ada pada satu pihak yang kontra terhadap tindakan Ahok. Lead yang dipakai Kompas juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Pedri Kasman menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau ke Polda Metro Jaya. Pedri mengatakan, pernyataan Ahok tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan penistaan bagi Islam. Bahkan, kata Pedri, Ahok telah melecehkan dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan. "Kami akan laporkan Ahok ke Polda Metro Jaya secara resmi dengan tuduhan penistaan agama," ujar Pedri. (06/10/16)

Lead ini secara jelas menunjukkan kontra yang terjadi dalam pernyataan tersebut. Pandangan Pedri Kasman yang bertolak belakang dipakai untuk mendukung kalimat pembuka. *Headline* ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana wartawan mengkonstruksi isu tersebut. Dalam berita tersebut, wartawan mengemukakan latar belakang atas peristiwa yang ditulis. *Latar* yang dipakai adalah terkait pernyataan Ahok yang dinilai sebagai bentuk penghinaan dan penistaan bagi agama Islam saat kunjungannya ke Pulau Seribu beberapa waktu yang lalu. Latar tersebut dipakai untuk menerangkan bahwa ucapan Ahok beberapa waktu lalu telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Alquran.

Latar umum ditampilkan di awal paragraf sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan. Wartawan bisa jadi memiliki

pendapat yang dibuat, bahwa pendapat tersebut tidak omong kosong, tetapi didukung oleh ahli yang kompeten dan berwenang. Wartawan mewawancarai orang yang tidak setuju atau kontra dengan pernyataan Ahok untuk mengecilkan pendapat orang yang setuju bahwa makna sebenarnya dari yang ahok katakan adalah bukan maksud “dibodohi”.

Dari struktur *Skrip*, Kompas menggunakan Pola piramida terbalik yakni 5W+1H. Kompas mengisahkan pemberitaan tersebut dengan unsur siapa yang memberikan pernyataan tersebut – sekretaris Pimpinan Pusat Muhamadiyah (*who*), pernyataan seperti apa yang diberikan – pihaknya akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penistaan agama (*what*), tanggal rencana akan dilaporkannya pada 06 Oktober 2010 (*when*), dan bagaimana kronologis nya – ucapan ahok mengutip surat Al-maidah ayat 51 beberapa waktu lalu dinilai telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Alquran (*how*), dalam berita tersebut disajikan unsur (*why*) wartawan memberikan makna yang ditekankan kepada publik adalah Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penistaan agama.

Dari struktur *tematik*, Kompas hanya membawa satu tema yang ingin ditampilkan kepada khalayak. Pernyataan Pedri Kasman yang menilai Ahok telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Al-qur'an saat kunjungannya ke Pulau Seribu, sehingga berencana akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penistaan agama. Tema ini disusun dalam teks berita dengan cara bercerita melalui

pernyataannya yakni dengan memberikan detail pada teks. Hipotesis semacam ini akan menentukan bagaimana strategi wacana yang dibuat oleh wartawan.

Dari struktur *retoris*, Kompas memberi penekanan pada *“Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah menyesalkan statement Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang terang telah menghina dan menistagama Islam dengan menggunakan kalimat “dibodohi” terhadap isi Alquran*. Selain kalimat tersebut juga Kompas memberikan penekanan terhadap kalimat seperti *Pedri mengatakan, pernyataan Ahok tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan dan penistaan bagi Islam. Bahkan, kata Pedri, Ahok telah melecehkan dasar negara yang menghargai keberagaman dan kebhinekaan*. Dengan kalimat semacam itu, seperti yang dikutip Pedri Kasman Kompas memberikan penekanan bahwa Ahok telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat ‘dibodohi’.

Kata ‘menghina’, ‘melecehkan’, ‘penistaan’ mempunyai makna seperti menjelek-jelekan. Pemakaian kata-kata tersebut seringkali diiringi dengan penggunaan label-label tertentu, biasanya dikaitkan dengan agama. Pilihan kata semacam itu, menunjukkan sikap dan ideologi Kompas.

Frame : Ahok akan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya	
Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Wawancara sekretaris pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah yang berencana akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya secara resmi atas tuduhan penistaan agama
Skrip	Pernyataan Muhammadiyah Pedri Kasman sekretaris pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, ditempatkan diawal, saling melengkapi,

	saling menanggapi dalam posisi yang setara
Tematik	Pernyataan Pedri Kasman yang menilai Ahok telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi Al-qur'an saat kunjungannya ke Pulau Seribu, sehingga berencana akan melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penistaan agama
Retoris	Pemakaian klaim penilaian Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, serta penggunaan kata "menghina, melecehkan, dan penistaan" yang umumnya dikaitkan dengan agama

2. Berita 07 Oktober 2016 (Judul : Ahok Bantah Menghina Kitab Suci)

Jum'at 07 Oktober 2016, Ahok membantah bahwa dirinya telah menghina kitab suci Al-qur'an. Ahok memilai video berisi ucapannya telah dipotong-potong dan disalah gunakan.

Kompas menekankan bahwa video berisi ucapannya saat menyebutkan surat Al-maidah ayat 51 tidak dibenarkan, karena video yang ditampilkan tidak secara utuh melainkan sudah di edit. Oleh karena itu, Kompas menekankan dengan menyertakan langsung dari pihak yang bersangkutan. Pandangan Kompas ini dapat dilihat dari judul berita serta kutipan berita berikut ini :

Ahok Bantah Menghina Kitab Suci (Jum'at 07 Oktober 2016)

Kompas.com – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak merasa pernah menghina ayat suci dalam Al Quran. Ia menilai video berisi ucapannya yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu telah disalahgunakan oleh sejumlah orang. Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, videonya saat berbicara di Kepulauan Seribu itu dipotong-potong dan tidak ditampilkan secara utuh.

Ahok mengatakan, alasannya melontarkan ucapan yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51 disebabkan ayat tersebut kerap digunakan oleh lawan politik untuk menyerang. Kondisi itu disebutnya sudah terjadi sejak ia pertama kali terjun di dunia politik pada 2003 di Belitung Timur.

"Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut selalu menggunakan ayat itu untuk membodohi orang (agar) tidak pilih saya," ujar Ahok.

Kompas memaknai pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai masalah yang kontroversial dari sudut hukum dan agama, karena sebelumnya Buni yani mengunggah video di akun facebooknya tidak secara utuh, sehingga menjadi viral di jagat sosial media. Kemudian masalah tersebut dikaitkan dengan isu SARA menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam pandangan Kompas masalah semacam ini memicu Isu SARA menjelang Pilkada DKI 2017.

Kompas hanya menangkap peristiwa tersebut sebagai suatu wacana yang berkembang di masyarakat terutama sangat bertolak belakang dengan Islam. Sikap Kompas hanya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi langsung dengan mewawancarai hasil keterangan dari pihaknya yang bersangkutan. Dengan strategi wacana yang dimunculkan terkait dugaan penistaan agama ke permukaan seperti itu, maka makna yang muncul dari berita yang ditulis Kompas adalah permasalahan yang meruncing kepada isu dugaan penistaan agama.

Struktur *Sintaksis*, akan terlihat bagaimana frame tersebut disusun dalam skema berita yang dibuat. Frame tersebut tampak jelas dari judul berita yang dipakai "Ahok bantah menghina kitab suci". Dengan pemakaian judul semacam itu, Kompas ingin menekankan bahwa perdebatan oleh sebagian pihak, diklarifikasi langsung oleh yang bersangkutan. Ahok sendiri mengaggap bahwa video yang ditampilkan tidak secara utuh melainkan telah

dipotong-potong. Sehingga telah disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Kemudian *latar* yang ditulis Kompas yang ingin ditampilkan wartawan yakni bagaimana berita ini memiliki latar belakang tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika Ahok menyampaikan pidato nya di Kepulauan Seribu Jakarta. Latar yang digunakan Kompas menerangkan alasannya secara detail bahwa selama ini apa yang sebenarnya Ahok katakan inti dari Surat Al Maidah ayat 51 tidak seperti yang disebut-sebut selama ini. Headline yang dipakai Kompas juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak merasa pernah menghina ayat suci dalam Al Quran. Ia menilai video berisi ucapannya yang menyebut Surat Al Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu telah disalahgunakan oleh sejumlah orang. Menurut pria yang biasa disapa Ahok itu, videonya saat berbicara di Kepulauan Seribu itu dipotong-potong dan tidak ditampilkan secara utuh. (7/10/2016).

Lead ini secara umum menunjukkan perspektif Kompas dari peristiwa yang diberitakan. Bagian lain yang terpenting adalah pengutipan narasumber yakni Ahok dimaksudkan untuk membangun objektivitas prinsip keseimbangan serta tidak memihak seperti yang ada dalam ideologi Kompas yakni tidak terlibat dalam golongan.

Dari struktur *skrip*, Kompas mengisahkan dengan 5W+1H. Ahok membantah bahwa dirinya telah menghina ayat Al-qur'an (*what*), siapa yang menyatakan hal tersebut (*who*), mengapa Ahok menyatakan Hal itu (*why*), dan bagaimana detail alasan yang terjadi. Dengan mengisahkan peristiwa semacam

inikompas ingin menegaskan pandangannya dalam menulis berita yang lengkap, akurat, objektif serta tidak memihak golongan manapun.

Dari struktur *tematik*, berita ini membawa dua tema yang ingin ditampilkan kepada khalayak. *Pertama* Pernyataan Ahok dalam membantah dirinya menghina ayat yang ada dalam kitab suci Al-qur'an. Hipotesis tersebut diambil dengan menunjukkan bukti peristiwa yang berkaitan dengan video yang ditampilkan tidak secara utuh melainkan telah dipotong-potong oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hipotesis semacam ini akan menentukan bagaimana strategi wacana yang dibuat oleh wartawan. Kompas menuliskan berita secara detail sebab – akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Tema *kedua*, Kompas menggambarkan fakta yang berhubungan dengan tema pertama. Proposisi “Ahok membantah menghina ayat kitab suci” dan Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak telah menistakan ajaran agama terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu adalah dua buah fakta yang berlainan. Dua buah proposisi tersebut menjadi berhubungan sebab – akibat ketika dihubungkan dengan kalimat atas ucapannya, Ahok dianggap banyak pihak atas dugaan penistaan agama.

Pada aspek retorik, penekanan pada pernyataan pada pernyataan Ahok untuk menekankan kepada khalayak bahwa isu yang diangkat benar tidak mengada-ada, melainkan benar. Kompas mengutip pernyataan Ahok “*Saya tidak mengatakan menghina Al Quran. Saya tidak mengatakan Al Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, menggunakan ayat suci itu untuk*

tidak pilih saya, ya silakan enggak usah pilih," kata Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/10/2016)". Penekanan semacam ini membawa frame Kompas bahwa Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi orang yang dianggap banyak pihak melakukan tindak dugaan penistaan agama.

Frame : Bantahan Ahok	
Elemen	Strategi penulisan
Skematis	Mewawancarai Ahok sebagai sumber berita. Menempatkan pernyataan Ahok di awal dan di akhir tulisan
Skrip	Penekanan pada pernyataan Ahok yang membantah dirinya menghina agama Islam
Tematik	(1) Pernyataan Ahok dalam membantah dirinya menghina ayat yang ada dalam kitab suci Al-qur'an. (2) Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak telah menistakan ajaran agama terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu.
Retoris	Klaim otoritas narasumber untuk menguatkan pendapatnya

3. Berita 08 November 2016 (Judul : *Hamka Haq : "Tidak Ada Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok"*)

Selasa, 08 November 2016, Hamka Haq menilai tidak ada penindakan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama saat menyampaikan pidatonya di Kepulauan Seribu.

Kompas secara tegas bahwa apa yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu, menyebutkan bahwa tidak ada tindakan penistaan agama. Oleh karena itu, Kompas menegaskan dengan memperkuat pernyataan yang disampaikan oleh Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama MUI. Berikut kutipan berita Kompas dengan merujuk beberapa narasumber :

Hamka Haq : Tidak Ada Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok (selasa, 8 November 2016)

Kompas.com — Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka Haq, menilai, tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al Maidah ayat 51.

Menurut Hamka, konteks saat Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu.

Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. (8/11/16)

Narasumber yang menjadi rujukan Kompas dalam menilai tindak dugaan penistaan agama salah satunya berasal dari kalangan ulama. Hamka yang menjadi narasumber berita bukan sekedar ulama, tetapi juga bagian dari dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pernyataan yang dikeluarkan memiliki nilai berita yang lebih tinggi daripada narasumber biasa. Label tidak ada tindak dugaan penistaan agama serta dibarengi dengan kepercayaan sebagian warga Jakarta terhadap kinerja Ahok dalam membangun Jakarta yang lebih baik.

Dari struktur *sintaksis*, frame Kompas menyusun dalam skema berita yang dibuat. Kompas bersandar pada *kutipan* dengan Narasumber. Frame tersebut tampak jelas dari judul berita yang dipakai dari sisi hukum agama dan tata bahasa menimbulkan pro dan kontra. Kompas menggunakan kata pada judul salah satu nama anggota MUI untuk mempertegas. Dengan pemakaian judul semacam itu, Kompas ingin menekankan bahwa letak perdebatan adalah pada hukum dimana satu pihak tidak membenarkan tindakan Ahok, sementara sisi lain memandang tindakan Ahok itu dibenarkan.

Kompas memilih untuk mengambil berita dari narasumber resmi yang secara kewenangan adalah Dewan pertimbangan MUI, lembaga negara dalam urusan agama. Anggota dewan pertimbangan MUI adalah representasi tokoh Islam di Indonesia yang suaranya secara resmi mewakili kepentingan umat Islam. Anggota MUI sendiri dianggap sekunder, karena mereka mempunyai landasan yuridis yang sama-sama kuatnya. *Lead* yang dipakai Kompas juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka Haq, menilai, tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al Maidah ayat 51. Menurut Hamka, konteks saat Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain.

Lead ini secara jelas menunjukkan pro-kontra yang terjadi diantara ahli tafsir agama seperti MUI dengan masyarakat mayoritas muslim mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Fakta disusun oleh wartawan dengan memisahkan pendapat. Kompas ternyata memilih teknik penyusunan fakta, dimana pendapat Hamka diuraikan lengkap dengan argumentasi secara tata bahasa dan keagamaan. Makna yang ingin ditampilkan dengan cara penyusunan fakta seperti ini adalah sisi pandangan ahli agama seperti anggota MUI dalam menyikapi masalah tersebut.

Kemudian dari sisi *skrip*, Kompas menekankan 5W+1H (*what, who, where, why, when, how*). Kompas mengisahkan peristiwa tersebut kedalam berita, Hamka dikisahkan 5W+1H – apa pendapatnya (*what*), siapa yang berdebat (*who*), mengapa mereka berpendapat seperti itu (*why*), dan

bagaimana detail pendapat mereka (*how*). Dengan cara mengisahkan kontroversi semacam ini, berita ingin menekankan pada khalayak bahwa pendapat terhadap masalah seperti itu jangan disalah artikan terlebih dulu dan pendapat Hamka dipandang memiliki argumentasi yang kuat.

Dari struktur *tematik* ada dua tema dalam berita ini. *Pertama* pernyataan Hamka sebagai penekanan terhadap kasus tindakan dugaan penistaan agama, bahwa konteks saat Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu Jakarta. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. Tema ini disusun dalam teks dengan cara bercerita, yakni dengan memberikan detail pada teks. Dalam teks diuraikan bahwa Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. Serta saat itu Ahok tidak menyebut pihak yang disebut melakukan pembohongan dengan menggunakan surat Al Maidah ayat 51.

Tema *kedua*, Hamka juga menuturkan tuduhan menghina ulama yang dialamatkan ke Ahok juga sulit untuk dibuktikan. Di satu sisi pernyataan dari anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan bahwa tidak ada kata menghina ulama dalam pidatonya yang disampaikan di kepulauan Seribu, Jakarta. Serta tidak ada yang menyebutkan siapa subjek dan objeknya yang memakai ayat tersebut. Ini dapat dilihat dari kutipan atas pendapat anggota DPR RI Fraksi PDI-P, yang diuraikan dengan detail.

Dalam teks berita Kompas ini, masing-masing pihak juga mengedepankan retorika untuk menakankan kepada khalayak atas kebenaran pandangannya. Retorika yang dipakai ialah bahasa-bahasa formal beserta penafsirannya. Hal tersebut dilabeli dengan keterangan sebagai ahli dari pihak terlapor saat dimintai keterangannya oleh Penyelidik Bareskrim Polri. Hamka menekankan bahwa proses hukum yang sedang dijalani dengan memberi penekanan :
 “"Saya melihat sejauh ini tidak ada penistaan agama karena konteks ucapan itu adalah konteks kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan," ujar Hamka. Hamka juga memakai metafora tertentu untuk memberi istilah orang yang tidak sependapat dengannya. Selain itu terdapat label otoritas ketokohan yakni anggota dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia

Frame : Tidak ada tindak dugaan penistaan agama	
Elemen	Strategi penulisan
Skematis	Wawancara anggota dewan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai pandangan sependapat dengan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI-P. Kedua nya menilai tidak ada tindak dugaan penistaan agama. Kedua pendapat tersebut disertai dengan bukti dan alasan yang sama.
Skrip	Pendapat anggota MUI yang tidak setuju ditempatkan saling melengkapi, saling menanggapi dalam posisi yang setara.
Tematik	(1) Pernyataan Hamka Haq bahwa konteks saat Ahok menyebut surat Al Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu Jakarta. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. (2) tuduhan menghina ulama yang dialamatkan ke Ahok juga sulit untuk dibuktikan.

Retoris	Pemberian label otoritas ketokohan yakni sebagai representasi tokoh islam
---------	---

4. Berita 29 November 2016 (Judul : Kasus Dugaan Penistaan Agama Jadi Beban Elektoral bagi Ahok-Djarot")

Selasa, 29 November 2016, setelah ditetapkannya sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 16 November 2016 oleh Bareskrim Polri rupanya membawa dampak bagi tingkat elektabilitas yang dimiliki Ahok menjelang Pilkada 2017. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok mengakibatkan beban elektoral bagi pasangan Ahok-Djarot menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Beban tersebut berdampak pada penurunan elektabilitas pasangan calon Ahok – Djarot

Kompas memaknai peristiwa pernyataan Yunarto Wijaya terkait beban elektoral bagi pasangan calon Ahok-Djarot sebagai masalah primordialisme dari sudut politik. Kompas secara tegas menyebut dampak dari tuduhan dugaan penistaan agama membawa beban elektoral bagi pasangan calon tersebut. Beban tersebut dibuktikan dengan survey yang dilakukan lembaga survey dalam mengukur tingkat elektabilitas pasangan calon. Oleh karena itu Kompas memperkuat dengan pernyataan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Berikut kutipan berita :

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jadi Beban Elektoral bagi Ahok-Djarot (29/11/16)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi beban elektoral bagi pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Beban itu berdampak terhadap penurunan elektabilitas pasangan calon petahana tersebut. Berdasarkan hasil survei Charta Politika, ada beberapa faktor masyarakat tidak memilih Ahok.

Dari 521 responden yang bukan pemilih Ahok, 17,1 persen di antaranya tidak memilih Ahok karena bicaranya yang kasar, 15,1 persen karena berbeda agama, 6 persen karena kasus penistaan agama, dan 5 persen yang tidak memilih karena menilai Ahok arogan (29/11/16)

Kompas menangkap akibat yang ditimbulkan dari kasus dugaan penistaan agama yang berpengaruh pada menurunnya elektabilitas ahok. Dengan strategi wacana tersebut makna yang muncul dari berita yang ditulis Kompas adalah sebuah kasus yang berkaitan dengan hukum agama, kemudian berubah menjadi polemik situasi politik yang tidak kondusif menjelang Pilkada 2017. Selain itu Kompas juga memaknai kegaduhan sensitifitas agama yang memicu isu SARA menjelang Pilkada 2017 ini menjadi sebuah beban elektoral bagi pasangan calon Ahok – Djarot.

Dari struktur *sintaksis*, frame tersebut jelas dari judul berita yang dipakai “Kasus Dugaan Penistaan Agama Jadi Beban Elektoral Bagi Ahok-Djarot”. Dengan pemakaian semacam itu, Kompas ingin menekankan bahwa polemik situasi politik yang tidak kondusif dikaitkan dengan agama memicu isu SARA, sehingga menjadi beban elektoral salah satu pasangan calon menjelang Pilkada 2017. Lead yang dipakai Kompas juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menjadi beban elektoral bagi pasangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Beban itu berdampak terhadap penurunan elektabilitas pasangan calon petahana tersebut.

Lead semacam ini secara jelas menerangkan kasus dugaan penistaan agama membawa dampak beban elektoral bagi pasangan calon Ahok-Djarot. Pandangan Yunarto Wijaya dipakai untuk mendukung kalimat pembuka. Dalam peristiwa tersebut, *Latar* yang dipakai adalah dibalik kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok. Latar tersebut dipakai untuk menerangkan bahwa selama ini yang menjadi menurunnya elektabilitas Ahok adalah kasus yang menjerat Ahok .

Dari struktur *skrip*, Kompas dalam mengisahkan peristiwa tersebut menggunakan pola 5W+1H. Dalam berita tersebut ada unsur siapa yang menyampaikan pernyataan – Yunarto Wijaya (*who*), masalah apa – kasus dugaan penistaan agama menjadi beban elektoral bagi Ahok-Djarot (*what*), tanggal kejadian nya – 29 November 2016 (*when*), dan bagaimana kronologi masalah tersebut terjadi (*how*), serta unsur *why* yang menekankan kepada publik bahwa kasus dugaan penistaan agama menjadi beban elektoral bagi Ahok-Djarot. Melalui Skrip ini merupakan salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita.

Dari struktur *tematik*, Kompas membawa dua tema besar. *Pertama* kasus dugaan penistaan agama menjadi beban elektoral bagi pasangan calon Ahok-Djarot. Tema ini disusun dengan cara memaparkan pernyataan yakni dengan

memberikan detail pada teks. Berita ini menampilkan pernyataan Yunarto Wijaya setelah melakukan hasil survey. Tema ini didukung dengan detail persentase hasil survey.

Tema *kedua*, terkait dengan faktor tidak akan memilih Ahok di Pilkada 2017 mendatang. Tema ini ditampilkan dengan menyajikan persentase perolehan hasil survey diantaranya, 17,1 persen di antaranya tidak memilih Ahok karena bicaranya yang kasar, 15,1 persen karena berbeda agama, 6 persen karena kasus penistaan agama, dan 5 persen yang tidak memilih karena menilai Ahok arogan. Disatu sisi pernyataan bahwa Yunarto berpendapat, faktor bicara kasar, beda agama, dan kasus penistaan agama saling berkaitan dengan tingkat elektabilitas Ahok saat ini.

Dua buah tema atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dihubungkan dengan koherensi. Dua buah proposisi ini menjadi hubungan sebab-akibat ketika dihubungkan dengan kata “saling berkaitan. Melalui kata ini, wartawan secara strategis menggunakan perangkat bahasa untuk menjelaskan fakta atau peristiwa.

Dari struktur *retoris*, Yunarto Wijaya memakai retorika tertentu untuk memberikan penekanan bahwa pernyataannya adalah benar. Kompas melakukan penekanan dengan Penggunaan kata “beban elektoral dan penurunan elektabilitas”. Dengan demikian pilihan kata yang dipakai tidak semata-mata hanya kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana Kompas memberikan pemaknaan terhadap fakta atau realitas.

Frame : Beban Elektoral Ahok-Djarot Menjelang Pemilu	
Elemen	Strategi penulisan
Skematis	Wawancara Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya yang menjelaskan kasus dugaan penistaan agama menjadi beban elektoral bagi Ahok-djarot
Skrip	Pendapat Winarto Wijaya secara detail yang mengungkapkan beban elektoral ahok-djarot berdampak penurunan elektabilitas
Tematik	(1) Kasus dugaan penistaan agama menjadi beban elektoral bagi pasangan calon Ahok-Djarot. (2) faktor tidak akan memilih Ahok di Pilkada 2017 mendatang.
Retoris	penekanan dengan Penggunaan kata “beban elektoral dan penurunan elektabilitas”.

5. Berita 11 Desember 2016 (Kasus Penistaan Agama Disebut untuk Menjegal Ahok dalam Pilkada DKI)

Minggu, 11 desember 2016, kompas menilai kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok dinilai sarat kepentingan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit melihat adanya kejanggalan mulai dari proses gelar perkara di Kepolisian. Sehingga disebutkan kasus tersebut dinilai untuk menjegal Ahok di Pilkada DKI

Kompas memaknai peristiwa kejanggalan-kejanggalan Penetapan Ahok sebagai tersangka kasus tersebut setelah dilakukan gelar perkara dari sudut hukum dan politik. Kompas menunjukkan bahwa peristiwa itu diperdebatkan oleh ahli pengamat politik. Pandangan kompas ini dapat dilihat dari kutipam berita dan judul sebagai berikut :

Kasus Penistaan Agama Disebut untuk Menjegal Ahok dalam Pilkada DKI (11/12/16)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sarat kepentingan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit melihat kegagalan kasus Ahok mulai dari proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian.

Sejumlah ahli dan penyidik diketahui sebelum menetapkan Ahok sebagai tersangka tidak bulat. Penetapan Ahok sebagai tersangka kasus tersebut setelah dilakukan gelar perkara.

"Masalahnya adalah pada gelar perkara hitung-hitungan suara, terus kalah Ahok. Kalau dalam soal itu, keinginan mayoritas Ahok kan keluar dari pencalonan, kan begitu," kata Arbi Sanit saat dihubungi wartawan, Minggu (11/12/2016).

Menurut dia, politisasi agama juga kental dalam kasus penistaan agama Ahok ini. "Ya politisasi agama. Dia bukan dikalahkan kualifikasi sebagai calon, tapi dikalahkan oleh penolakan berdasarkan agama," katanya.

Kompas menangkap pernyataan tersebut mempunyai sikap yang jelas, seolah penetapan sebagai tersangka kepada Ahok dipicu oleh politisasi agama. Dengan strategi wacana seperti itu, makna yang muncul dari berita yang ditulis Kompas ialah perdebatan yang meruncing dari pihak yang tidak setuju atas penetapan Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.

Dari struktur *sintaksis*, frame tersebut secara jelas dipakai "kasus dugaan penistaan agama disebut untuk menjegal Ahok dalam Pilkada DKI" dengan pemakaian judul semacam ini Kompas ingin menekankan bahwa letak menjegal Ahok dalam Pilkada dikaitkan dengan kasus dugaan penistaan agama sebagai politisasi agama, dimana satu pihak tidak membenarkan penetapan Ahok sebagai tersangka. Pengamat Politik sendiri mempunyai landasan yuridis. Lead yang pakai Kompas menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sarat kepentingan. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit melihat kejanggalan kasus Ahok mulai dari proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian. Sejumlah ahli dan penyidik diketahui sebelum menetapkan Ahok sebagai tersangka tidak bulat. Penetapan Ahok sebagai tersangka kasus tersebut setelah dilakukan gelar perkara.

Lead semacam ini secara jelas menunjukkan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok sarat akan kepentingan. Pendapat wartawan yang selaras untuk mendukung kalimat pembuka. Pandanga tersebut untuk menyikapi proses tersebut. Latar yang dipakai adalah kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Ahok dinilai sarat kepentingan. *Latar* tersebut dijelaskan lebih awal menurut pandangan wartawan. Latar itu dipakai untuk menerangkan bahwa selama ini kasus dugaan penistaan agama disebut-sebut untuk menjegal Ahok di Pilkada DKI. Latar tersebut menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam teks berita Kompas.

Dalam perselisihan politisasi agama, secara sistematis wartawan berusaha mempertahankan pendapat pengamat Politik Universitas Indonesia dan menyerang argumentasi pihak lain. Ini merupakan cermin ideologis Kompas. Pemberian latar semacam ini akan memberikan akan membentuk opini publik. *Latar* penulisan berita ini menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata, melainkan pendapat dari orang yang memiliki ahli dibidang tertentu.

Dari struktur *Skrip*, Kompas dalam mengisahkan peristiwa menggunakan unsur 5W+1H. Unsur *who* (Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sani), *what* (kasus penistaan agama disebut untuk menjegal Ahok dalam

pilkada DKI 2017). *Why* (adanya kejanggalan dalam proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian, penetapan sebagai status tersangka tidak bulat), dan *how* (diketahui sebelum menetapkan Ahok sebagai tersangka tidak bulat. Penetapan Ahok sebagai tersangka kasus tersebut setelah dilakukan gelar perkara. Dengan mengisahkan kontroversi semacam itu, Kompas ingin menekankan kepada khalayak bahwa argumentasinya mempunyai alasan yang kuat.

Dari struktur *tematik*, Kompas membawa dua tema besar. *Pertama* kasus dugaan penistaan agama dinilai sarat kepentingan. Peristiwa kasus dugaan penistaan agama ditafsirkan sebagai masalah yang “sarat kepentingan”. Penafsiran tersebut didukung oleh pemakaian kalimat atau penulisan tertentu untuk mendukung hipotesis tersebut. Semua aspek wacana tersebut dipandang sebagai suatu strategi untuk meyakinkan khalayak akan pemaknaan wartawan kepada pembaca. Hipotesis yang dibuat oleh wartawan itu akan menentukan bagaimana strategi wacana yang dibuat oleh wartawan. Fakta yang diambil wartawan diikuti dengan pernyataan pengamat politik Universitas Indonesia ditujukan untuk membuktikan hipotesis yang dibuat oleh wartawan. Hipotesis tersebut ditandakan secara menonjol yakni proses perkara yang dilakukan polisi terasa adanya kejanggalan.

Tema *kedua*, politisasi kasus penistaan agama ini yang disebut-sebut menjegal Ahok menjelang Pilkada DKI. Tema kedua ini sebagai penjelas dari tema pertama. Dua buah tema yang saling berhubungan menjadi hubungan sebab-akibat.

Dari struktur *retoris*, *Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit* menekankan bahwa melihat adanya kejanggalan kasus Ahok mulai dari proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian. Dengan kalimat itu, Arbi ingin menekankan bahwa adanya kejanggalan yang dimulai dari proses gelar perkara pada kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh polisi. Ia juga memberi pernyataan dengan istilah “politisasi agama”. Politisasi agama sendiri adalah istilah upaya untuk menjadikan agama sebagai alat untuk meraih tujuan politik. Kompas sendiri memberi label keilmuwan kepada Arbi Sanit dengan otoritas intelektual tertentu dengan “Pengamat Politik Universitas Indonesia”

Frame : kasus penistaan agama yang sarat kepentingan	
Elemen	Strategi penulisan
Skematis	Wawancara Pengamat Politik Universitas Indonesia Arbi Sanit yang melihat adanya kejanggalan kasus penistaan agama pada proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian
Skrip	Pernyataan Arbi Sanit yang menyatakan adanya kejanggalan dalam proses gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian.
Tematik	(1) kasus dugaan penistaan agama dinilai sarat kepentingan. (2) politisasi kasus penistaan agama ini yang disebut-sebut menjegal Ahok menjelang Pilkada DKI
Retoris	Pemberian label otoritas keilmuwan dari pakar pengamat politik yang diwawancarai memberi bukti klaim otoritas secara politik.

3.4.3 Frame Media Online Republika dalam Pemberitaan “Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok” Edisi Oktober – Desember 2016

Suatu hari setelah diunggahnya video terkait ucapan Ahok saat mengutip surat Al-maidah ayat 51, banyak pihak yang menilai bahwa Basuki Tjahaja

Purnama alias Ahok telah menghina agama Islam dengan menggunakan kalimat "dibodohi" terhadap isi ayat Al-quran, sehingga sejumlah pihak berencana melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri atas tuduhan tindak dugaan penistaan agama. Republika menurunkan berita "Video Ahok: 'Anda Dibohongi Al-quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Media Social'". Dalam pandangan republika pernyataan yang disampaikan Ahok ketika di Kepulauan Seribu merupakan sesuatu hal yang sangat kontroversial dan bertolak belakang dengan ideologi republika. Pandangan semacam ini akan terlihat dari bagaimana republika melakukan strategi wacana tertentu dengan menggiring publik untuk ikut apa yang telah disimpulkan oleh wartawan dalam berita untuk mendukung gagasannya.

Tabel 3.2

Data Analisis Berita Republika

No	Tanggal	Judul Berita	Paragraf
1	06 Oktober 2016	Video Ahok: 'Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos'	6
2	30 Oktober 2016	Felix Shiauw : Jika Ahok Lolos Dari Kasus Al-Maidah, Keadila Sudah Mati	10
3	24 November 2016	Kasus Dugaan Penistaan Agama Tenggelamkan Elektabilitas Ahok	8
4	15 November 2016	Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok Diyakini Objektif	4
5	27 Desember 2016	Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok	4

3.4.4 Penerapan Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris Republika

Sebagai media yang selama ini dipandang banyak memberitakan Islam kalangan moderat, Republika secara tegas menyatakan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah sebuah penistaan agama dengan penggunaan kata “dibodohi” pada ayat Al-qur’an. Beberapa judul berita berikut ini memberikan gambaran bagaimana konstruksi pemberitaan republika tentang dugaan penistaan agama.

1. Berita 06 Oktober 2016 (judul : Video Ahok: ‘Anda Dibohongi Al-quran Surat Al-Maidah 51 Viral di Media Social’)

Kamis 06 Oktober 2016 setelah beredarnya video ahok beberapa waktu lalu, Republika menurunkan pemberitaan beredarnya video berjudul '*Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51*'. Video tersebut tengah menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter.

Dari analisis *sintaksis*, pandangan republika diwujudkan dalam skema berita. Judul berita republika sudah sangat jelas menunjukkan pandangan republika. Judul tersebut melakukan normalisasi bahwa pernyataan Ahok di videonya menjadi viral di jagat media sosial. Judul semacam ini membawa pesan bahwa Ahok sebagai pemimpin beretnis Cina menyampaikan kalimat-kalimat yang menyinggung umat islam atau yang biasa disebut mencela atau menghina. Berikut kutipan berita tersebut :

Video Ahok: Anda Dibohongi Alquran Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos (Jum'at 06 Oktober 2016).

REPUBLIKA.CO.ID - Saat ini di Youtube beredar video berjudul 'Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51'. Video tersebut tengah menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter. Video yang diunggah sejak 5 Oktober kemarin itu, banyak dilihat pengunjung jejaring sosial video tersebut.

Dalam video tersebut, Ahok terlihat mengatakan, "*Bapak Ibu ndak Bisa memilih Saya. dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena inikan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi, bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok.*"

Saat Dikonfirmasi, Juru Bicara Timses Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul membantah kalau Ahok menyebut Surat Al Maidah bohong. Menurut Ruhut, ada orang yang sengaja memelintir pernyataan Ahok untuk memainkan isu SARA.

"Padahal isu SARA sekarang itu sudah gak laku. Masyarakat Jakarta itu sudah cerdas," kata Ruhut. (06/10/16)

Dalam teks berita tersebut republika mewawancarai juru bicara tim sukses Ruhut Sitompul, berpandangan terkait video Ahok yang telah beredar luas di dunia maya. Pada kalimat pembuka republika tidak menyertakan pandangan narasumber, tetapi murni pendapat wartawan. Tetapi di paragraf selanjutnya di bantah dengan pernyataan Ruhut Sitompul bahwa apa yang dikatakan ahok ketika di kepulauan seribu adalah tidak benar. Ruhut juga menilai bahwa video tersebut di gunakan untuk memprovokasi masyarakat jakarta dengan memainkan isu SARA. Republika hanya menangkap perbedaan pendapat tersebut belum memiliki sikap yang jelas atas peristiwa tersebut. Pandangan Republika sendiri memiliki landasan pedoman dasar agama islam untuk memperkuat alsannya. Lead yang dipakai republika juga menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Saat ini di Youtube beredar video berjudul '*Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51*'. Video tersebut tengah menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter. Video yang diunggah sejak 5 Oktober kemarin itu, banyak dilihat pengunjung jejaring sosial video tersebut.

Lead ini secara jelas, bahwa republika ingin menunjukkan dan menyadarkan khalayak pernyataan Ahok yang viral di medsos merupakan suatu penghinaan atau penistaan terhadap agama islam. Pandangan wartawan sendiri dipakai untuk menunjukkan bahwa pandangan republika di perkuat dengan landasan agama pedoman umat islam yaitu Al-qur'an surat Al-maidah ayat 51.

Latar yang dipakai adalah pernyataan ahok yang mengutip 'dibodohi' surat al-maidah ayat 51. Latar tersebut dipakai untuk menerangkan bahwa selama ini Ahok melakukan tindak dugaan penistaan agama dengan mengutip ayat tersebut. Hal semacam itu sangat bertentangan dengan ideologis republika yaitu nasionalis-islam. Latar umumnya ditampilkan diawal pembuka dengan maksud mempengaruhi dan memberikan kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan.

Dari struktur *Skrip*, Kompas menggunakan pola 5W+1H ini merupakan salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi beritanya. Melalui peristiwa tersebut agar khalayak dapat memahaminya, Wartawan menyusun dengan cara mengisahkan menggunakan unsur *who* (Ahok), *what* (pernyataan Ahok yang mengutip 'dibodohi' surat Al-maidah ayat 51 viral di medsos), *where* (di Kepulauan Seribu Jakarta), *when* (06 Oktober 2016) dan *how* (malalui pidatonya dihadapan audien, Ahok menyampaikan rancangan

programnya yang kemudian mengutip ayat tersebut). Namun dalam berita tersebut tidak disajikan unsur *why*.

Dari struktur *tematik*, republika membawa dua tema besar. *Pertama* beredar video berjudul '*Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51*'. Video tersebut tengah menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter. Dengan hipotesis semacam ini merupakan strategi untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak dengan versi pemaknaan wartawan kepada khalayak. Hipotesis ini diambil dengan bukti peristiwa video yang menjadi viral di media sosial. Hipotesis yang dibuat wartawan ini akan menentukan strategi wacana yang dibuat oleh wartawan.

Tema *kedua*, pernyataan juru bicara tim sukses Ahok-Djarot Ruhut Sitompul membantah pengutipan tersebut tidak dibenarkan. Menurutnya video tersebut digunakan ada yang sengaja memelintir pernyataan Ahok untuk memainkan isu SARA menjelang Pilkada 2017. Dua buah tema ini menjadi berhubungan saat dihubungkan dengan kata “saat dikonfirmasi” namun kedua tema ini tidak saling menjelaskan. Namun secara tidak langsung sedikit menjelaskan dengan adanya saat dikonfirmasi ruhut sitompul. Secara strategis republika menggunakan perangkat bahasa yang menjelaskan fakta atau peristiwa. Namun peristiwa tersebut dipandang secara terpisah.

Dari struktur *retoris*, republika menekan arti yang ingin ditonjolkan wartawan yaitu '*Ahok: Anda Dibohongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51*'. Penulisan cetak miring tersebut untuk memberikan penekanan pesan dalam

berita yang ditulis wartawan. Secara tidak langsung republika ingin menaruh perhatian lebih pada bagian tersebut. Penggunaan cetak miring tersebut merupakan bentuk ekspresi lain untuk memberikan penekanan.

Frame : Pernyataan Ahok yang Mengutip Surat Al-maidah Ayat 51 Menjadi Viral Di Media Sosial	
Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Pernyataan Wartawan Republika yang dilengkapi dengan wawancara juru bicara tim sukses Ahok, Ruhut Sitompul. yang membantah bahwa pengutipan tersebut tidak benar
Skrip	Pendapat wartawan yang kontra maupun ruhut sitompul yang pro ditempatkan saling melengkapi, saling menanggapi dalam posisi yang setara. Penekanan pada aspek bahasa yang diucapkan
Tematik	(1) beredar video berjudul ' <i>Ahok: Anda Diboongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51</i> ' viral di media sosial. (2) pernyataan ruhut sitompul yang membantah pengutipan ayat tersebut tidak dibenarkan
Retoris	Penekanan yang ingin ditonjolkan melalui penggunaan huruf cetak miring ' <i>Ahok: Anda Diboongi Al-Quran Surat Al-Maidah 51</i> '

2. Berita 30 Oktober 2016 (judul : Felix Shiauw : Jika Ahok Lolos Dari Kasus Al-Maidah, Keadilan Sudah Mati)

Minggu 30 Oktober 2016, setelah beredarnya video Ahok yang mengutip surat Al-maidah ayat 51. Republika menurunkan pemberitaan ustadz Felix shiauw mengomentari terkait kasus dugaan penistaan agama, menurutnya jika ahok lolos dari kasus dugaan penistaan agama, maka keadilan di indonesia sudah mati.

Republika memaknai peristiwa pernyataan felix shiauw terkait keadilan hukum di indonesia yang dinilainya sudah mati, sebagai masalah yang kontroversial dari sudut hukum tata negara dan hukum agama. Secara tidak langsung Republika mendukung terhadap pernyataan ustadz Felix Shiauw. Republika menunjukkan bahwa peristiwa itu diperdebatkan oleh ahli yang memiliki wewenang dibidang agama. Pandangan republika ini dapat dilihat dari kutipam berita dan judul sebagai berikut.

Felix Shiauw : Jika Ahok Lolos Dari Kasus Al-Maidah, Keadilan Sudah Mati (06/10/16)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ustaz Felix Shiauw mengomentari terkait penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terkait surah Al Maidah ayat 51. Menurutnya jika Ahok lolos dari kasus tersebut, hukum di negeri ini benar-benar sudah mati.

Bahkan rekaman penistaan itu bisa diputar berap kali pun diinginkan. Ulama sudah menegaskan bahwa yang dilakukan Ahok adalah penistaan, pakar linguistik sudah angkat bicara. Masyarakat awam pun tak akan menilai lain selain itu tindak penistaan.

"Yang sudah jelas dan terang benderang, Muslim Indonesia terluka. Tapi sang penista dan gerombolannya masih bersikeras, ini hanya isu politik, ini kampanye hitam. Sementara umat yang makin marah hari ke hari, terus disudutkan," ujarnya (06/10/17)

Republika menangkap pernyataan tersebut menunjukkan sikap yang pro terhadap keadilan hukum diperkuat dengan pernyataan narasumber, sehingga harus segera disikapi oleh Bareskrim Polri. Dengan strategi wacana seperti itu, makna yang muncul dari berita yang ditulis republika adalah pendapat yang meruncing dari tokoh agama islam yang mengecam tindak dugaan penistaan agama untuk segera di adili oleh kepolisian.

Dari analisis *sintaksis*, pandangan republika diwujudkan dalam skema berita. Judul berita republika sudah sangat jelas menunjukkan bagaimana pandangan republika. Judul tersebut melakukan justifikasi bahwa ustadz Felix Shiauw menilai jika ahok lolos dari kasus dugaan penistaan agama sebagai masalah yang kontroversial dari sudut hukum tata negara dan hukum normalisasi agama. Kutipan berita semacam ini republika ingin membawa pesan bahwa jika ahok lolos dari hukumannya, maka keadilan hukum di indonesia sudah lenyap. Dengan pemakaian judul semacam itu republika ingin menekankan bahwa penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait surah Al Maidah ayat 51. Jika Ahok lolos dari kasus tersebut, hukum di negeri ini benar-benar sudah mati. Lead yang pakai republika menunjukkan dengan jelas frame semacam ini :

Ustaz Felix Shiauw mengomentari terkait penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama terkait surah Al Maidah ayat 51. Menurutnya jika Ahok lolos dari kasus tersebut, hukum di negeri ini benar-benar sudah mati

Lead semacam ini secara jelas menunjukkan pro-kontra yang terjadi antara penegak hukum dengan kalangan umat muslim. Pandangan Felix Shiauw yang mengecam tindakan tersebut dipakai untuk mendukung kalimat pembuka. Kemudian pandangan felix shiauw ini mewakili pernyataan umat muslim di indonesia yang menginginkan keadilan dalam penanganan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok.

Latar yang dipakai adalah penanganan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok dinilai berjalan sangat lambat, Felix Siauw melihat kepolisian kehilangan taji, hingga kini tetap berdiam diri. Alasan demi alasan dikarang, proses hukum harus ditekan. Padahal, menurutnya, video sudah terekam sempurna, penistaan terhadap Alquran yang membawanya jelas terekam. Latar tersebut dipakai untuk menerangkan bahwa penegakkan hukum dalam menangani kasus dugaan penistaan agama masih lalai, polisi seolah terbelenggu oleh masalah perpolitikan.

Latar tersebut menjadi alasan pembenaran gagasan yang diajukan dalam teks berita. Permasalahan agama dikaitkan dengan politisasi agama. Republika menekan kan dengan latar umum ditampilkan diawal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa pendapat wartawan beralasan. Berita yang ditulis wartawan tidak objektif dan kurang kurang berimbang disisi lain republika juga tidak memihak kepada pemimpin beretnis Cina, tetapi lebih memihak kepada umat Islam. Republika juga menekan kan bahwa apa yang ditulis wartawan bukan pendapat wartawan semat, melainkan pendapat dari orang yang mempunyai otoritas tertentu.

Dari struktur *skrip, frame* republika mengisahkan peristiwa yang diangkat adalah bagaimana proses penegakkan hukum pada kasus dugaan penistaan agama yang lambat dan jika lolos keadilan hukum di Indonesia telah mati. Teks berita Republika dijumpai unsur 5W+1H. Unsur *who* (Felix Siauw), *what* (Jika Ahok lolos dari kasus dugaan penistaan agama, maka keadilan

hukum sudah mati), *when* (30 Oktober 2016), *why* (proses penegakkan hukum dalam mengadili hukuman bagi kasus penistaan agama masih lambat), *how* (aksi demi aksi ditunjukkan umat Muslim. Hari demi hari, kota demi kota, tak pernah sepi dari tuntutan keadilan. Mulai dari menayangkan, pengumpulan tanda tangan, petisi, kecaman, kutukan, sampai laporan resmi sudah dilayangkan kaum Muslim, namun tetap tak ada hasilnya).

Dari struktur *tematik*, republika membawa satu tema yaitu pernyataan ustadz felix shiauw yang mengomentari jika Ahok lolos dari kasus dugaan penistaan agama, maka keadilan hukum di indonesia sudah mati. Dalam teks, tema ini didukung oleh alasan-alasan yang berbau pembelaan umat muslim, yang menginginkan penanganan kasus ahok di adili dengan seadil-adilnya. Tema ini dapat dilihat kutipan pernyataan felix shiauw, argumentasi yang diberikan untuk menyatakan bahwa proses hukum harus ditekan dan berjalan sangat lamban.

Dari struktur *retoris*, frame umat islam menuntut keadilan hukum pada kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok didukung dengan penekanan-penekanan tertentu. Retorika yang banyak dipakai adalah pemakaian kalimat yang mensugesti dan mempengaruhi bahkan memprovokasi umat islam dengan kalimat “*Yang jelas, jika Ahok lolos dari hukuman dalam kasus penistaan Alquran ini, terang bahwa keadilan di negara ini sudah mati,*” kata Felix Siauw di akun Twitter pribadinya menurutnya, *video sudah terekam sempurna, penistaan terhadap Alquran dan*

ulama yang membawanya jelas”. Klaim tersebut untuk menekankan bahwa pandangannya paling benar.

Klaim legal otoritas keagamaan dan salah satu tokoh HTI ini dibantu dengan berupa otoritas keilmuan agama islam untuk menekankan bahwa pendapatnya sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Felix Shiauw didekati dengan kata “ustadz” yang mengkomunikasikan bahwa pendapat yang disampaikan mempunyai bobot keislaman yang kuat.

Frame : Jika Ahok Lolos dari Hukumannya, Maka Keadilan Hukum Sudah mati	
Elemen	Strategi penulisan
Skematis	Mewawancarai ustadz Felix Shiauw sebagai sumber berita. Menempatkan pernyataan Felix Shiauw di awal dan di akhir tulisan
Skrip	Penekanan pada pernyataan felix shiauw yang terkesan mempengaruhi umat islam bahwa jika Ahok lolos dari kasus Al-maidah ayat 51, maka keadilan di indonesia sudah mati.
Tematik	pernyataan ustadz felix shiauw yang mengomentari jika Ahok lolos dari kasus dugaan penistaan agama, maka keadilan hukum di indonesia sudah mati. Dalam teks, tema ini didukung oleh alasan-alasan yang berbau pembelaan umat muslim, yang menginginkan penanganan kasus ahok di adili dengan seadil-adilnya
Retoris	Klaim legal otoritas keagamaan dan salah satu tokoh HTI sebagai narasumber untuk menguatkan pendapatnya

3. Berita 24 November 2016 (Judul : Kasus Dugaan Penistaan Agama Tenggelamkan Elektabilitas Ahok)

Kamis, 24 November 2016, Republika menurunkan pemberitaan terkait dugaan penistaan agama yang menjerat ahok berakibat tenggelamnya elektabilitas Ahok. Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi

mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017.

Republika memaknai peristiwa pernyataan Burhanudin sebagai masalah tingkat elektabilitas Ahok yang semakin menurun bahkan yang berakibat bisa menenggelamkan elektabilitasnya. Kasus tersebut juga dimaknai oleh republika sebagai proses yang sewaktu-waktu bisa terjadi karena dapat mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya, dari yang tadinya bersifat rasional menjadi tidak rasional. Pandangan republika ini dapat dilihat dari kutipam berita dan judul sebagai berikut :

Kasus Dugaan Penistaan Agama Tenggelamkan Elektabilitas Ahok (24/11/16)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017.

"Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya, dari yang tadinya bersifat rasional menjadi tidak rasional," ujar Burhanuddin, di Jakarta, Kamis (24/11).

Dia menuturkan, selama ini elektabilitas para kandidat pejabat selalu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja mereka. Namun, untuk situasi di Jakarta hari ini, hubungan kedua variabel justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Dengan demikian, republika menangkap peristiwa tersebut diakibatkan mencuatnya isu SARA menjelang Pilkada 2017 menjadi salah satu faktor paling berpengaruh yang membuat banyak pemilih di Jakarta enggan memilih

Ahok, meskipun kinerjanya sebagai pemimpin memperoleh apresiasi yang tinggi. Kemudian isu-isu primordial saat ini lebih tertanam di dalam memori warga Jakarta, dibandingkan isu-isu yang bersifat teknokratis, substantif, dan rasional.

Dari analisis *sintaksis*, frame yang disusun republika dalam skema berita yang dibat. Frame tersebut tampak jelas dari judul berita yang dipakai “kasus dugaan penistaan agama tenggelamkan elektabilitas Ahok”. Dengan pemakaian judul semacam itu, republika ingin menekankan bahwa Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya. Direktur Indikator Politik Indonesia memiliki landasan yuridis berdasarkan hasil survey nya. Lead yang dipakai republika menunjukkan frame semacam ini :

Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan ke Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017.

Lead semacam ini secara jelas menunjukkan kasus dugaan penistaan agama yang menenggelamkan elektabilitas Ahok dipengaruhi persepsi warga jakarta secara signifikan dalam menentukan pilihan nya di Pilkada 2017. Pandangan Burhanudin sendiri dipandang mewakili perbedaan yang ada dalam masyarakat Jakarta menyikapi penurunan elektabilitas yang signifikan.

Latar yang dipakai dalam teks berita tersebut adalah kasus dugaan penistaan agama dan Isu SARA yang mengubah persepsi warga jakarta. Latar tersebut digunakan untuk menerangkan bahwa selama ini yang membuat

tenggelamnya elektabilitas Ahok ialah terkait kasus dugaan penistaan agama yang mengubah persepsi warga Jakarta yang signifikan. Latar umumnya ditampilkan di awal sebelum pendapat wartawan yang sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberikan kesan bahwa pendapat wartawan sangat beralasan.

Dari struktur *skrip*, republik dalam mengisahkan peristiwa menggunakan unsur 5W+1H. Unsur *who* (Direktur Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi), unsur *what* (Kasus Dugaan Penistaan Agama Tenggelamkan Elektabilitas Ahok), *why* (Terpelesetnya Ahok dalam kasus al-Maidah ayat 51 membuat isu primordial yang sebelumnya mengendap, isu SARA akhir-akhir ini menjadi salah satu faktor paling berpengaruh yang membuat banyak pemilih di Jakarta enggan memilih Ahok), *How* (Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya). Wartawan memberikan penekanan kasus dugaan penistaan agama dan isu SARA yang membuat tenggelamnya elektabilitas Ahok.

Dari struktur *tematik*, republik membawa dua tema besar, *pertama*, kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017. Dalam teks, tema ini didukung oleh alasan-alasan yang berbau politisasi agama dengan mengacu pada hasil survey oleh lembaga survey. Di satu sisi mayoritas warga Jakarta mengakui kinerja Ahok selaku petahana (pejabat), tapi di sisi lain justru banyak dari mereka yang tidak memilih Ahok jika pilkada berlangsung.

Penulisan fakta tersebut dilakukan untuk mendukung gagasan. Selain itu, sebagai strategi untuk mensugesti dan meyakinkan khalayak akan versi pemaknaan wartawan kepada khalayak. Hipotesis tersebut diambil dengan mengajukan bukti peristiwa yang berkaitan dengan tenggelamnya nya elektabilitas Ahok berdasarkan hasil survey salah satu lembaga survey. Hipotesis yang dibuat wartawan ini akan menentukan bagaimana strategi wacana yang dibuat oleh wartawan.

Tema *kedua*, Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya. Dua buah tema yang menggambarkan yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat dihubungkan dengan *koherensi*. Kasus dugaan penistaan agama dan Isu SARA adalah dua buah fakta yang berlainan, dua buah proposisi itu menjadi hubungan sebab-akibat ketika dihubungkan dengan kata “dan” faktor paling berpengaruh yang membuat banyak pemilih di Jakarta enggan memilih Ahok.

Dari struktur *retoris*, republika melakukan penekanan pesan melalui kalimat “*Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya, dari yang tadinya bersifat rasional menjadi tidak rasional*”. republika ingin menonjolkan faktor yang mempengaruhi tenggelamnya elektabilitas Ahok. Klaim legal indikator politik indonesia memberikan label berupa otoritas kepakaran tertentu untuk menekankan bahwa pendapat dan hasil survey Burhanudin benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Frame : Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Menenggelamkan Elektabilitas Ahok
--

Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Wawancara Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi yang menyatakan tenggelamnya elektabilitas Ahok. Republika menempatkan pendapat Direktur untuk menilai kasus dugaan penistaan agama yang disangkakan ke Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017.
Skrip	Penekanan pada aspek Isu SARA dan Kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok
Tematik	(1) kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok ikut memberi pengaruh signifikan terhadap persepsi warga Ibu Kota dalam menentukan pilihannya pada Pilkada 2017. (2) Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) mengubah persepsi masyarakat Jakarta dalam menentukan pilihannya.
Retoris	Klaim legal indikator politik indonesia memberikan label berupa otoritas kepakaran tertentu untuk menekankan bahwa pendapat dan hasil survey Burhanudin benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Berita 15 Desember 2016 (Judul : Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok Diyakini Objektif)

Kamis 15 Desember 2016, republika menurunkan berita pernyataan Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, meyakini proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan obyektif. Berbagai masalah yang kontroversial terkait kasus dugaan penistaan agama mulai dari diunggah nya video tersebut hingga proses gelar perkara. Republika membuat strategi dengan melahirkan wacana yang di sorot sebagai framing.

Republika memaknai pernyataan jazuli Juwaini tersebut sebagai masalah yang kontroversial dari sudut hukum tata negara. Republika tidak mendukung atau menentang atas proses gelar perkara kasus tersebut. Republika hanya

menunjukkan bahwa peristiwa kasus dugaan penistaan agama dalam menjalani proses gelar perkara masih diperdebatkan oleh beberapa ahli hukum. Pandangan republika ini dapat dilihat dari judul serta kutipan berita berikut ini :

Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok Diyakini Objektif (15/12/16)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, meyakini proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan obyektif. Sehingga, ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya kasus pelecehan Alquran surat Al Maidah ayat 51 ini kepada kepolisian.

"Semua akan berjalan secara obyektif. Jangan ada prasangka-prasangka bahwa kepolisian akan bertindak kurang adil atau tidak independen dalam menjalankan tugasnya," kata Jazilul, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Jazilul menyatakan, DPR ikut mengawasi gelar perkara Ahok yang rencananya dilangsungkan pada Selasa (15/11), untuk memastikan proses hukum yang berlangsung memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apalagi, tekanan dari masyarakat kepada polisi begitu kuat hingga muncul demo 4/11 yang merupakan aksi terbesar setelah reformasi.

Dengan demikian, republika menangkap pernyataan tersebut mempunyai sikap yang jelas atas gelar perkara tersebut. Dengan strategi wacana seperti itu, makna yang muncul dari berita yang ditulis kompas adalah pernyataan yang meruncing, bahwa gelar perkara yang dilakukan kepolisian diyakini objektif, maka dari itu jazilul Fawaid menghimbau untuk tidak ada prasangka buruk bahwa hukum tidak bertindak adil.

Dari struktur *sintaksis*, pandangan republika diwujudkan dalam skema berita berita. Frame tersebut tampak jelas dari judul berita dan kutipan narasumber yang dipakai "Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, meyakini proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja

Purnama atau Ahok berjalan obyektif” berbeda dengan *kompas*, *republika* memakai kalimat “proses gelar perkara diyakini obyektif” dan bukan “melihat kejanggalan kasus Ahok mulai dari proses gelar perkara yang dilakukan kepolisian.

Dengan pemakaian judul semacam itu, *republika* ingin menekankan bahwa proses hukum yang dijalani Ahok mulai dari proses gelar perkara disatu sisi memandang gelar perkara kasus dugaan penistaan agama diyakini obyektif.

Lead yang dipakai *republika* menunjukkan frame semacam ini :

Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid, meyakini proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berjalan obyektif. Sehingga, ia mengimbau masyarakat untuk mempercayakan sepenuhnya kasus pelecehan Alquran surat Al Maidah ayat 51 ini kepada kepolisian.

Lead seperti ini secara jelas menunjukkan pro atau mendukung terhadap proses gelar perkara yang diyakini obyektif, teknik penyusunan fakta dalam penyusunan teks berita *republika*, wartawan memberikan penekanan yang lebih atas pendapat tersebut. Sementara wacana yang dikembangkan dalam berita tersebut adalah proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang diyakini obyektif. *Latar* yang dipakai *republika* adalah prasangka-prasangka masyarakat bahwa kepolisian akan bertindak kurang adil atau tidak independen dalam menjalankan proses gelar perkara. Latar tersebut dipakai untuk menerangkan bahwa proses hukum yang berlangsung diyakini memenuhi rasa keadilan masyarakat. Bila dilihat tekanan dari masyarakat kepada polisi begitu kuat.

Dari struktur *skrip*, dalam mengisahkan berita, republika menggunakan unsur 5W+1H. *Who* (Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid), *what* (proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Ahok berjalan Objektif), *when* (15 Desember 2016), *why* (prasangka masyarakat bahwa kepolisian akan bertindak kurang adil atau tidak independen dalam menjalankan tugasnya) dan *how* (DPR ikut mengawasi gelar perkara Ahok yang dilaksanakan pada Selasa (15/11), untuk memastikan proses hukum yang berlangsung memenuhi rasa keadilan masyarakat). *Skrip* merupakan salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita.

Dari struktur *tematik*, wartawan dalam menuliskan teks berita tersebut hanya membawa satu tema. Proses gelar perkara diyakini berjalan Objektif, karena tekanan dari masyarakat kepada polisi begitu kuat hingga muncul aksi demonstrasi damai di beberapa titik daerah ibu kota. Dalam teks tema ini di dukung oleh alasan dengan detail yang pendek hanya 4 paragraf. Penulisan teks berita tersebut dipandang sebagai suatu strategi untuk mensugesti khakayak dengan versi pemaknaan wartawan kepada khalayak.

Dari struktur retorik, republika melakukan penekanan dengan "*Semua akan berjalan secara obyektif. Jangan ada prasangka-prasangka bahwa kepolisian akan bertindak kurang adil atau tidak independen dalam menjalankan tugasnya,*" kata Jazilul. Republika ingin menonjolkan sisi objektif dalam proses gelar perkara. Selain itu penggunaan kata :pelecehan

Frame : gelar perkara kasus dugaan penistaan agama berjalan objektif	
Elemen	Strategi Penulisan

Skematis	Wawancara Anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid yang meyakini proses gelar perkara kasus dugaan penistaan agama berjalan objektif
Skrip	Penekanan pada aspek proses hukum yang berlangsung memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Tematik	Proses gelar perkara diyakini berjalan Objektif, karena tekanan dari masyarakat kepada polisi begitu kuat hingga muncul aksi demonstrasi damai di beberapa titik daerah ibu kota
Retoris	Penggunaan kata “pelecehan”

5. Berita 27 Desember 2016 (Judul : Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok)

Selasa 27 Desember 2016, setelah ditetapkannya sebagai tersangka pada 15 desember 2016 lalu, republika menurunkan pemberitaan majelis hakim tolak eksepsi Ahok dalam persidang kasus dugaan penistaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam persidangan Ahok mengajukan eksepsi kepada majelis hakim namun ditolak.

Dalam pandangan republika penolakan eksepsi oleh ketua majelis hakim sebagai proses yang seharusnya terjadi, karena terlihat jelas keberpihakkan republika kontra terhadap sosok Ahok. Republika mengarahkan publik untuk setuju terhadap berita yang ditulisnya pandangan semacam ini akan terlihat dari bagaimana republika melakukan strategi wacana tertentu dalam berita untuk mendukung gagasannya. Pandangan republika ini dapat dilihat dari judul berita dan kutipan berita berikut ini :

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Ahok (27/12/16)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Hakim sidang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan menolak semua

keberatan terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Dalam putusan sela tersebut, pengadilan menilai keberatan Ahok dan timnya tiak beralasan.

"Dengan ini memutuskan keberatan terdakwa dan kuasa hukum tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi Santiarso di PN Jakarta Utara, Selasa (27/12).

Dengan putusan ini, majelis hakim juga menerima surat dakwaan dari Jakasa Penuntut Umum (JPU). Surat dakwaan dianggap cermat, jelas, dan lengkap. (27/12/16).

Republika mendorong publik untuk setuju, terhadap apa yang dituliskan dalam kutipan teks berita tersebut. Republika melakukan strategi bagaimana caranya publik tidak bisa berpendapat, tidak keluar pendapat pro-kontra. Jadi publik hanya harus mengikuti apa yang disampaikan republika. Jadi seolah-olah putusan tersebut sudah bulat, seperti yang dikatakan oleh majelis hakim. Republika Mensugesti langsung kepada khalayak.

Dari struktur *Sintaksis*, pandangan republika diwujudkan dalam skema berita. Judul republika sudah sangat jelas pandangan republika. judul tersebut sudah sangat jelas melakukan keberpihakan republika yang kontra Ahok. Selain itu tidak ada berita pendukung dari pihak Ahok. Dalam berita tersebut, terlihat jelas bahwa republika kontra Ahok walaupun dinyatakan secara halus, serta tidak secara jelas menekankan bahwa republika kontra Ahok. *Lead* yang dipakai republik menunjukkan dengan jelas frame semacam ini ;

Majelis Hakim sidang penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan menolak semua keberatan terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Dalam putusan sela tersebut, pengadilan menilai keberatan Ahok dan timnya tiak beralasan

Lead semacam ini secara jelas menunjukkan Secara halus republika menekankan bahwa eksepsi ahok di tolak tanpa alasan, isi eksepsi dan isi gugatannya ditolak. Waktu ahok mengajukan eksepsinya ditolak dan tidak ada

alasan yang jelas tidak disebutkan. Reaksi terhadap pihak ahok dan pihak penggugat tidak ada. Jadi hanya menutup semua panel untuk satu tujuan bahwa memberitakan eksepsi ahok ditolak. Publik hanya perlu tahu bahwa eksepsi ahok ditolak. Jadi majelis hakim akan terus memproses gugatan ahok.

Dari struktur *skrip*, dalam mengisahkan beritanya republika menggunakan unsur 5W+1H. Unsur *what* (majelis hakim tolak eksepsi ahok), *who* (ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara, Dwiwarso Budi), *when* (27/12/16), *where* (pengadila Negeri Jakarta Utara), *how* (menolak semua keberatan terdakwa dan tim kuasa hukumnya. Dalam putusan sela tersebut, pengadilan menilai keberatan Ahok dan timnya tidak beralasan). Namun dalam berita tidak disebutkan unsur *why*. Maka berita tersebut menjadi informasi yang berbeda. Publik tidak bisa berpendapat karena tidak alasan yang dikemukakan.

Dari struktur *tematik* tema yang dimunculkan republika hanya satu yaitu eksepsi ahok di tolak oleh ketua majelis hakim, kelanjutannya majelis hakim menerima surat dari JPU, dan sidang dilanjutkan. Walaupun ada maksud tersirat bahwa sedikit menekan pihak ahok. Menunjukkan bahwa keperpihakan republika ini kontra ahok dalam berita ini. sudah jelas, menutup pendapat lain. Apa yang terjadi dipersidangan ahok, dan kenapa ahok mengajukan eksepsi ditolak majelis hakim.

Republika mengaburkan beberapa fakta. Seperti apa isi eksepsi Ahok kenapa gugatannya dianggap tidak relevan oleh pihak ahok. Isi eksepsi dan isi gugatannya pun tidak dikemukakan. Jadi publik tidak bisa berpendapat pada putusan majelis hakim, apakah publik setuju atau tidak setuju. Jadi dalam teks

berita memberi petunjuk majelis hakim menolak tanpa alasan. Dalam kutipan *“Dengan ini memutuskan keberatan terdakwa dan kuasa hukum tidak dapat diterima,”* kata Ketua Majelis Hakim, Dwiwarso Budi Santiarso di PN Jakarta Utara, Selasa (27/12). Dalam kutipan tersebut tidak dicantumkan alasan penolakannya. Jadi publik tidak bisa berpendapat di masalah eksepsi ini, kembali lagi apakah publik setuju atau tidak.

Dari struktur *Retoris*, yang republica tekankan adalah putusan majelis hakim, yang dilihat dari kutipan majelis hakim hingga dipisahkan paragrafnya. Khusus ditengah bagian isi paragraf, *“Dengan ini memutuskan keberatan terdakwa dan kuasa hukum tidak dapat diterima,”*. Bukan dibagian pembuka maupun penutup. Majelis hakim dengan jelas menolak eksepsi dari pihak ahok. Penekanan kedua akan berjalan lagi dipersidangan ahok di paragraf ketiga, majelis hakim *Dengan putusan ini, majelis hakim juga menerima surat dakwaan dari Jakasa Penuntut Umum (JPU). Surat dakwaan dianggap cermat, jelas, dan lengkap.* Di paragraf tersebut sudah jelas, mengapa tidak ada pernyataan dari pihak lawannya. jadi yang menanggung jawab satu institusi online. Republica yang mengarahkan beritanya. Jadi memutus opini opini publik yang tidak setuju atau yang pro ahok.

Frame : Majelis Hakim Menolak Eksepsi Ahok Tanpa Alasan	
Elemen	Strategi Penulisan
Skematis	Wawancara ketua majelis hakim PN Jakarta Utara Dwiwarso Budi memutuskan menolak semua eksepsi dan gugatan terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Skrip	Pernyataan Dwiwarso Budi Ketua Majelis Hakim di Persidangan Kasus dugaan penistaan agama ditempatkan diawal dan paragraf kedua, sebagai penekanan eksepsi ahok ditolak tanpa alasan

Tematik	eksepsi ahok di tolak oleh ketua majelis hakim, kelanjutannya majelis hakim menerima surat dari JPU, dan sidang dilanjutkan
Retoris	kutipan majelis hakim hingga dipisahkan paragrafnya. Khusus ditengah bagian isi paragraf, " <i>Dengan ini memutuskan keberatan terdakwa dan kuasa hukum tidak dapat diterima</i> "

3.4.5 Perbandingan Frame Republika dan Kompas

Peristiwa viralnya video pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu di media sosial, hingga tertuduh kasus dugaan penistaan agama mempunyai kontroversi yang besar seperti isu primordial menjelang Pilkada 2017 terutama dari sudut hukum dan agama.

1. Kompas

- a. Kompas mencoba melihat masalah-masalah dari berbagai segi dan lebih pada gaya humanismenya. Meskipun demikian di beberapa edisi, Kompas juga menggambarkan proses terjadinya dugaan penistaan agama hingga proses gelar perkara terbuka kasus dugaan penistaan agama. Peristiwa tersebut disajikan detail tetapi kental dengan gaya humanismenya.
- b. Kompas terlihat dengan komitmennya yaitu dalam setiap pemberitaannya berupaya untuk selalu bersikap netral, hal ini ditunjukkan dengan informasi yang lebih lengkap dan argumen dari wartawan porsinya hanya sedikit. Informasi yang lengkap itulah Kompas memberikan ruang bagi pembaca untuk memberikan kesimpulannya sendiri

- c. Kompas lebih menempatkan pihak yang setuju dan tidak setuju, lebih menunjukkan sisi kenetralannya dibanding republika dalam memberitakan dugaan penistaan agama
- d. Kompas tidak melibatkan diri dalam kelompok-kelompok tertentu baik politik, agama, sosial, atau golongan, ekonomi.
- e. Kompas juga secara aktif membuka dialog dan berinteraksi positif dengan segala kelompok, sehingga kompas memberi ruang kepada khalayak untuk berpendapat.
- f. Kompas terlihat cukup berhati-hati dalam menunjukkan keberpihakannya. Sehingga kompas lebih banyak memberikan ruang bagi publik untuk berpendapat.

2. Republika

- a. Republika lebih memosisikan dan menunjukkan keberpihakannya yang kontra atau non-Ahok secara halus. Pihak-pihak yang berpendapat dibiarkan tanpa diberi pemaknaan dari media yang bersangkutan.
- b. Republika lebih menutup pendapat publik, hanya menggiring publik setuju atau tidak setuju.
- c. Republika hadir dengan falsafah Islam moderatnya mengemas berita tersebut dengan menggambarkan secara detail kronologis kasus dugaan penistaan agam tersebut.
- d. Pemberian judul setiap pemberitaannya Republika cenderung menyudutkan pihak Ahok.

- e. Republika menyajikan berita tentang kasus dugaan penistaan agama tersebut sebagai Headline secara terus-menerus di halaman pertama dengan gambar serta judul yang ditulis dengan ukuran yang cukup besar. Judul berita Republika dengan menggunakan teknik empati.
- f. Republika memandang bahwa pemicu konflik agama ini adalah ucapan Ahok mengutip surat Al-maidah ayat 51 di kepulauan seribu yang di nilai telah menghina agama islam dengan menggunakan kalimat “dibodohi”. Meski banyak beredar pembingkaiian berita yang mengarah pada sentimen keagamaan namun Republika justru tidak pernah menyebutnya dalam bingkainya

